

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DAERAH RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UPAYA PEMERINTAH KAMPUNG DALAM PENGEMBANGAN
EKOWISATA MANGROVE DI KAMPUNG SUNGAI RAWA
KECAMATAN SUNGAI APIT KABUPATEN SIAK**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Program Studi Ilmu Pemerintahan
Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau*



FIZA ISMANIATI
NPM : 157310467

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
PEKANBARU
2019**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh.....

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT diiringi shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Penulis menyadari berkat rahmat dan hidayah Nya yang dilimpahkan kepada penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah dalam bentuk Skripsi yang berjudul : **Upaya Pemerintah Kampung Dalam Pengembangan Ekowisata Mangrove Di Kampung Sungai Rawa Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak** ini penulis tulis dan diajukan ke Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1)

Dalam menyelesaikan Skripsi ini penulis telah banyak diberikan bantuan baik berupa waktu, tenaga, kritik, saran dan kerjasama, diskusi dari pihak-pihak yang kompeten dan berdedikasi demi kesempurnaan penulisan sebuah karya ilmiah yang dimuat dalam sebuah usulan penelitian. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang berpartisipasi kepada penulis terutama :

1. Bapak selaku Rektor Universitas Islam Riau Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., M.C.L yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
2. Bapak H. Panca Setyo Prihatin, S.IP.,M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau, bersama dengan Wakil Dekan .
3. Bapak Budi Muliando, S.IP.,M.Si sebagai ketua program studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau.
4. Ibuk Sri Maulidiah, S.Sos.,M.Si selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan waktu, bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penulisan usulan penelitian ini.
5. Bapak Syaprianto, S.Sos.,M.IP selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan waktu, bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penulisan usulan penelitian ini.

6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen selaku staf pengajar khususnya jurusan ilmu pemerintahan Universitas Islam Riau yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan yang dimiliki kepada penulis.
7. Bapak Mulyadi dan Bapak Aduar selaku Penghulu dan Kerani, Ibu Kartini, Ibu Fitri Maryanti dan Ibu Kartini Apriyanti beserta seluruh staff Pemerintahan Kampung Sungai Rawa serta Bapak Junaidi selaku Ketua anggota Pemerhati Mangrove Kampung Sungai Rawa yang telah bersedia memberikan informasi dan penjelasan yang diperlukan dalam penelitian ini.
8. Terimakasih untuk semua Informan dan masyarakat Kampung Sungai Rawa yang telah bersedia memberikan informasi dan kerjasamanya.
9. Ayahanda tercinta Ismail dan Ibunda tercinta Halimah, terimakasih atas banyak cinta dan kasih sayang yang telah dicurahkan selama ini dan doa yang tak henti dipanjatkan untukku serta yang telah sudi menemani ku dalam melakukan penelitian baik panas maupun hujan.
10. Adikku tersayang Fizi Ismuhadi terimakasih atas kasih sayang dan cinta, motivasi, yang rela berkorban moril dan materil selama ini. Serta seluruh keluarga besar ku yang tercinta.
11. Sahabat-sahabatku Eka Putri Sari, Novitas Sari, Elma Putri Yunita, Ratih Ningsih dan semua teman-teman seperjuangan khususnya untuk Kelas IP G atas dukungan yang telah diberikan selama ini, semoga persahabatan kita tak pernah padam.
12. Untuk sahabat-sahabat kos 7 C yang telah memberikan semangat, motivasi dan nasihatnya selama ini.
13. Untuk yang terkasih Ardiansyah terimakasih atas dukungan moril maupun materil, semangat serta nasihatnya selama ini.

Penulis bermohon kepada Yang Maha Kuasa semoga segala bentuk bantuan, ilmu dan motivasi semua pihak hingga terselesainya penyusunan Skripsi ini menjadi amal ibadah yang baik dan mendapatkan balasan dari Allah SWT, Amin.

Penulis menyadari bahwa penulisan Skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu penulis mengharapkan masukan dan saran dari semua pihak demi penyempurnaan skripsi ini.

Akhir kata penulis berharap semoga semua kebaikan yang telah diberikan mendapat keridhaan Allah SWT dan semoga skripsi ini dapat memberikan suatu manfaat, bagi penulis maupun pembaca sekalian, Amin.

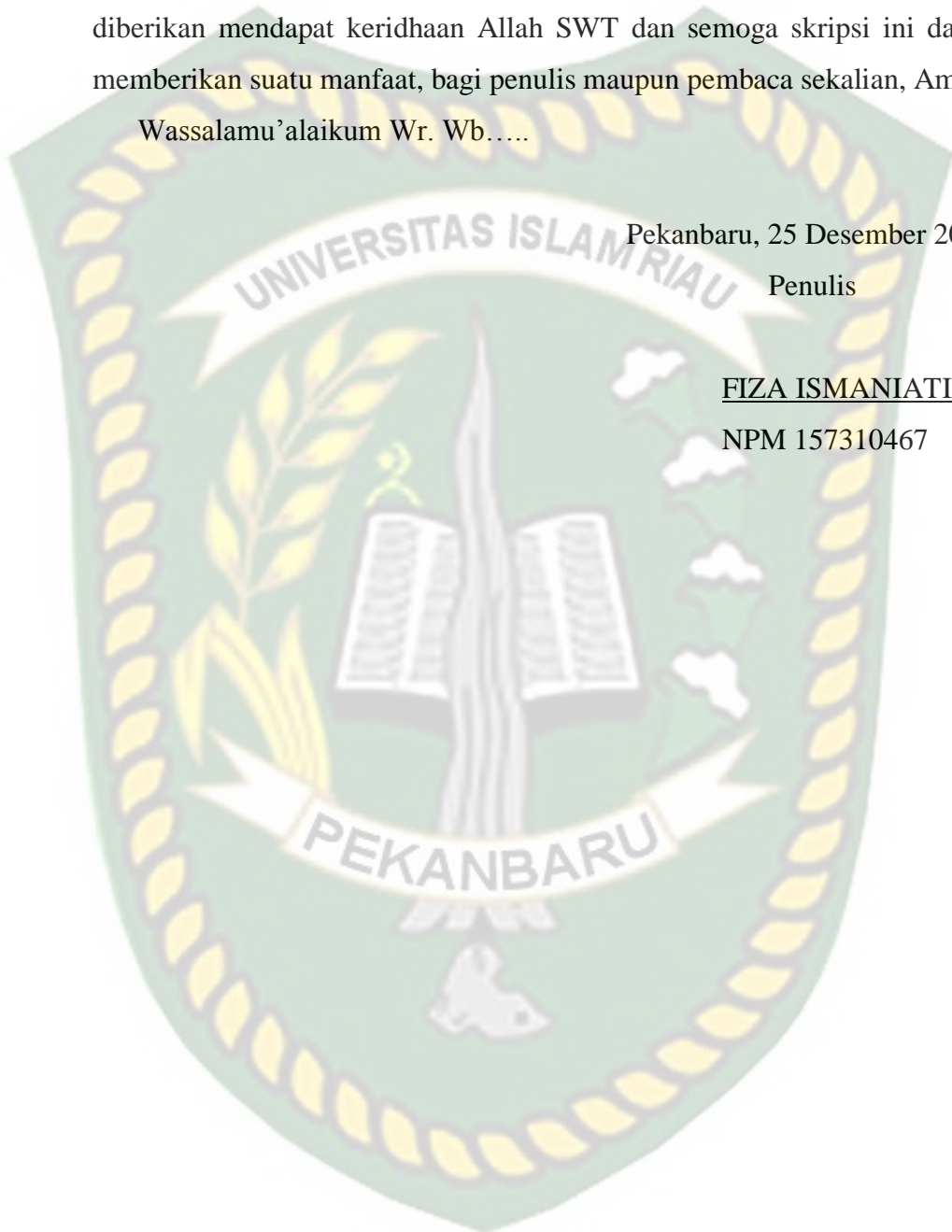
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.....

Pekanbaru, 25 Desember 2018

Penulis

FIZA ISMANIATI

NPM 157310467



DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
SURAT PERNYATAAN.....	xii
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT.....	xiv
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
 BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN	
A. Studi Kepustakaan.....	14
1. Teori Pemerintahan	14
2. Teori Pemerintah Desa	17
3. Teori Pengembangan.....	22
4. Teori Ekowisata	23
5. Teori Ekowisata Mangrove	27
6. Teori Pembangunan	27
7. Teori Manajemen Pemerintahan	30
8. Teori Wisata	32
9. Teori Pengembangan Pariwisata	34
B. Penelitian Terdahulu	47
C. Kerangka Pemikiran.....	48
D. Konsep Operasional	48
E. Operasional Variabel.....	50

BAB III : METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian	51
B. Lokasi penelitian	51
C. Informan dan Key Informan Penelitian.....	51
D. Jenis dan Sumber Data	52
E. Teknik Pengumpulan Data.....	53
F. Teknik Analisa Data.....	54
G. Teknik Penarikan Informan	55
H. Jadwal Penelitian.....	55

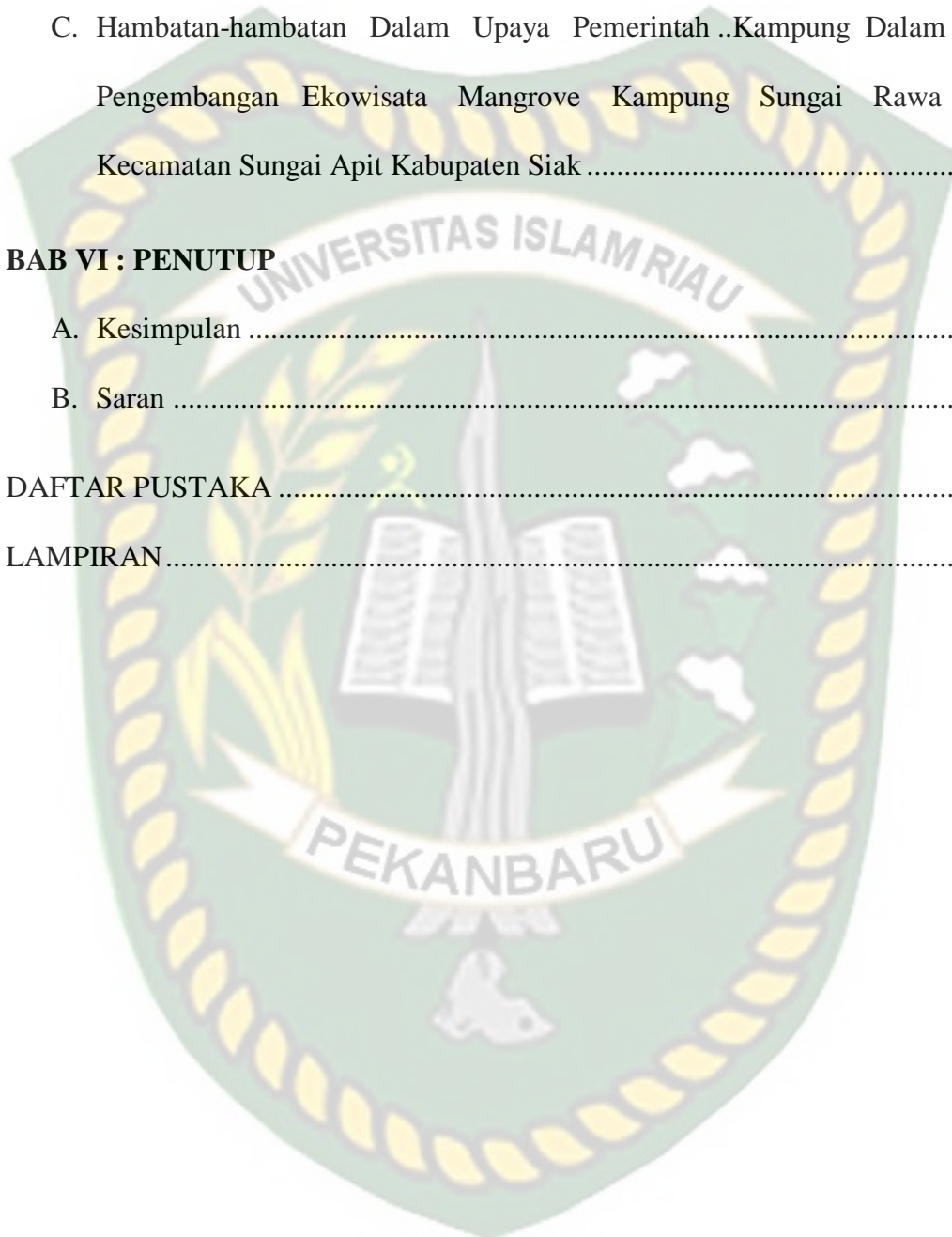
BAB IV : GAMBARAN UMU DAN LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kampung Sungai Rawa	56
1. Sejarah Kampung Sungai Rawa.....	56
2. Demografi	57
3. Keadaan Sosoal	58
B. Struktur Organisasi Pemerintahan Kampung Sungai Rawa.....	61
C. Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi Pemerintahan Kampung Sungai Rawa Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak.....	62
1. Penghulu	61
2. Kerani.....	65
3. Kepala Urusan.....	66
4. kepala Dusun.....	67

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden	69
1. Jenis Kelamin.....	69
2. Tingkat Pendidikan	69
3. Kelompok Umur Responden.....	70
4. Nama dan Identitas Responden.....	70

B. Tanggapan Responden Terhadap Upaya Pemerintah Kampung Dalam Pengembangan Ekowisata Mangrove Di Kampung Sungai Rawa Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak.....	71
C. Hambatan-hambatan Dalam Upaya Pemerintah ..Kampung Dalam Pengembangan Ekowisata Mangrove Kampung Sungai Rawa Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak.....	87
BAB VI : PENUTUP	
A. Kesimpulan	89
B. Saran	91
DAFTAR PUSTAKA	92
LAMPIRAN.....	95



DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
I.1	Kampung-kampung yang berada di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak	9
I.2	Jumlah Kampung Yang Memiliki Potensi Ekowisata	10
II.1	Penelitian Terdahulu	43
II.2	Operasional Variabel Upaya Pemerintah Kampung Dalam Pengembangan Ekowisata Mangrove Di Kampung Sungai Rawa Kabupaten Siak	50
III.1	Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian Tentang Upaya Pemerintahan Desa Dalam Pengembangan Ekowisata Mangrove Kampung Sungai Rawa Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak	55
IV.1	Jumlah Penduduk Kampung Sungai Rawa	58
IV.2	Tingkat Pendidikan Masyarakat Kampung Sungai Rawa	59
IV.3	Pekerjaan Masyarakat Kampung Sungai Rawa Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak	59
IV.4	Sarana Dan Prasarana Kampung Sungai Rawa	59
IV.5	Rincian Sarana dan Prasarana Ekowisata Mangrove Kampung Sungai Rawa.....	61
V.1	Klasifikasi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	69
V.2	Klasifikasi Responden Berdasarkan Jenjang Pendidikan Terakhir.....	69
V.3	Klasifikasi Responden Berdasarkan Latar Belakang Usia.....	70
V.4	Nama dan Identitas Responden.....	70

V.5 Upaya Pemerintah Kampung Dalam Pengembangan Ekowisata Mangrove
Di Kampung Sungai Rawa Kabupaten Siak 88



DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
II.I	Komponen Perencanaan/ Pengembangan Pariwisata (Inskeep (1991):38)	35
II.II	Kerangka Pikir Tentang Upaya Pemerintah Kampung Dalam Pengembangan Ekowisata Mangrove	47
IV.1	Susunan Tata Kerja Pemerintah Kampung Sungai Rawa Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak Pada Peraturan Bupati Siak Nomor 93 Tahun 2016.....	61



UPAYA PEMERINTAH KAMPUNG DALAM PENGEMBANGAN
EKOWISATA MANGROVE KAMPUNG SUNGAI RAWA
KECAMATAN SUNGAI APIT KABUPATEN SIAK

ABSTRAK

Fiza Ismaniati

157310467

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya dan hambatan pemerintahan desa dalam pengembangan ekowisata mangrove di Kampung Sungai Rawa. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah 1. Akses/jalan menuju ekowisata mangrove belum sepenuhnya baik, karena masih ada beberapa jalan yang masih berlubang dan berdebu, 2. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung di ekowisata mangrove, seperti kurangnya lahan parkir, tidak ada tempat ibadah dan tidak ada tersedia tempat sampah sehingga masih sering terlihat sampah-sampah disekitaran mangrove serta kurangnya tempat makan atau kantin disekitaran tempat wisata, 3. Kurangnya pemanfaatan sungai yang ada di tempat wisata yang seharusnya dapat dijadikan tempat pemancingan berbayar dan belum adanya kejelasan tentang tarif masuk dan tarif parkir. Konsep yang digunakan adalah konsep pengembangan Edward Inskeep, Indikator yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Pangsa Pasar, Tourist Attraction, Aksesibilitas, Fasilitas dan Pelayanan Wisatawan, Elmemen Institusi. Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif deskriptif. Data yang diperoleh melalui Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa upaya pemerintahan desa dalam pengembangan ekowisata mangrove cukup baik walaupun masih terdapat kekurangan terdapat kelemahan dan kekurangan Pemerintahan Desa Kampung Sungai Rawa dalam pengembangan ekowisata yakni kurangnya kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintahan Kampung Sungai Rawa dengan pihak lain seperti Kampung dengan Kampung lain maupun dengan Pemerintah Kabupaten sehingga pemerintahan desa kualahan dalam mencari dana untuk pengembangan ekowisata mangrove Kampung Sungai Rawa, Selain masalah dana selanjutnya ialah kurangnya pelayanan yang diberikan oleh pihak pengelola ataupun pemerintahan desa seperti tidak adanya petugas yang berjaga disekitaran tempat wisata serta kurangnya sarana pelengkap ekowisata mangrove untuk menarik minat pengunjung.

Kata Kunci: Pemerintahan Desa, Pengembangan, Ekowisata Mangrove

VILLAGE GOVERNMENT EFFORTS IN DEVELOPMENT OF MANGROVE
EKOWISATA KAMPUNG SUNGAI RAWA KECAMATAN SUNGAI
APIT, SIAK DISTRICT

ABSTRACT

Fiza Ismaniati

157310467

This study aims to determine the efforts and obstacles of village governance in the development of mangrove ecotourism in Sungai Rawa Village. The problems in this study are 1. Access / road to mangrove ecotourism is not yet fully good, because there are still some roads that are still hollow and dusty, 2. The availability of supporting facilities and infrastructure in mangrove ecotourism, such as lack of parking lots, no places of worship and there are no bins so there are still frequent trashes around the mangroves as well as lack of places to eat or canteens around tourist attractions, 3. Lack of use of rivers in tourist attractions that should be used as paid fishing grounds and lack of clarity about entry rates and tariffs parking. The indicators used in this study include Market Share, Tourist Attraction, Accessibility, Facilities and Tourist Services, Elmemen Institution. This study uses a descriptive qualitative method. Data obtained through Observation, Interview and Documentation. From the results of this study, it can be seen that the village administration's efforts in developing mangrove ecotourism are quite good, although there are still shortcomings, there are weaknesses and shortcomings of the Sungai Rawa Village Government in ecotourism development, namely the lack of cooperation by the Sungai Rawa Village Government with other parties such as villages with other villages as well as the District Government so that my village government failed to find funds for the development of Kampung Sungai Rawa mangrove ecotourism. In addition to the next funding problem, there was a lack of services provided by the village administration or government such as the absence of officers guarding the surrounding areas and lack of complementary mangrove ecotourism facilities. attract visitors.

Keywords: Village Government, Development, Ecotourism Mangrove

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Hal diatas dipertegas dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea 4 yang berbunyi:

“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...”

Dari pembukaan UUD 1945 tersebut jelas bahwa pemerintah pada umumnya menggerakkan pelayanan umum, pengaturan dan perlindungan masyarakat serta pembangunan dan pengembangan. Sedangkan tugas dan kewajiban pemerintah adalah membuat regulasi tentang pelayanan umum, pengembangan sumber daya produktif, melindungi ketentraman dan ketertiban masyarakat, pelestarian nilai-nilai sosial kultural, kesatuan dan persatuan nasional, pengembangan kehidupan demokrasi, pencapaian keadilan dan pemerataan, pelestarian lingkungan hidup, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, mendukung pembangunan nasional dan mengembangkan kehidupan

berbangsa bernegara dan masyarakat berdasarkan Pancasila serta menjaga tegak, lestari dan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagai Negara Kesatuan, Pemerintah Indonesia terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dasar pemikiran Pemerintahan Daerah ini adalah Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 berikut:

- (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.
- (2) Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahannya menganut asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Prinsip penyelegaraan desentralisasi adalah otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengatur dan mengurus semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Kebijakan otonomi daerah dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, secara eksplisit memberikan otonomi yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengelola berbagai kepentingan dan kesejahteraan masyarakat daerah. Pemerintah Daerah harus mengoptimalkan pembangunan daerah yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah daerah dan masyarakat di

daerah lebih diberdayakan sekaligus diberi tanggung jawab yang lebih besar untuk mempercepat laju pembangunan daerah.

Penyelenggaraan Desa dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Pengaturan Desa berasaskan:

- a. rekognisi;
- b. subsidiaritas;
- c. keberagaman;
- d. kebersamaan;
- e. kegotongroyongan;
- f. kekeluargaan;
- g. musyawarah;
- h. demokrasi;
- i. kemandirian;
- j. partisipasi;
- k. kesetaraan;
- l. pemberdayaan; dan
- m. keberlanjutan.

Salah satu aspek yang sangat penting dalam melaksanakan fungsi pemerintahan adalah melayani masyarakat dari berbagai aktifitasnya dan untuk itulah maka pemerintah membentuk administrasi dan birokrasi pemerintahan dari tingkat tertinggi sampai ke tingkat pemerintahan terendah agar dapat memberikan pelayanan yang lebih optimal bagi seluruh masyarakat dalam fungsinya sebagai pelayanan masyarakat atau abdi masyarakat.

Selain tugas kepala desa berdasarkan Undang-Undang No 6 tahun 2014

Tentang Desa pada pasal 26 disebutkan:

- (1) Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Desa berwenang:
 - a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa
 - c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa
 - d. Menetapkan peraturan Desa
 - e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
 - f. Membina kehidupan masyarakat Desa
 - g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat
 - h. Membina ketenytraman dan ketertiban masyarakat Desa
 - i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa
 - j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa
 - k. Mengembangkan kehidupan social budaya masyarakat Desa
 - l. Memanfaatkan teknologi cepat guna
 - m. Mengoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif
 - n. Mewakili Desa dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hokum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan
 - o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perangkat Desa dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa seperti yang dijelaskan dalam pasal 4 yaitu:

Perangkat Desa terdiri atas:

- a. Sekretariat Desa;
- b. Pelaksana Kewilayahan; dan
- c. Pelaksana Teknis.

Perangkat Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala Desa.

Seperti yang dijelaskan didalam pasal 5 yang berbunyi:

- a. Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf dipimpin oleh Sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang

bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.

- b. Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) urusan yaitu urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan, dan urusan perencanaan, dan paling sedikit 2 (dua) urusan yaitu urusan umum dan perencanaan, dan urusan keuangan.
- c. Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh kepala Urusan.

Kemudian dalam pasal 6 yaitu:

- a. Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
- b. Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dusun.
- c. Jumlah Kepala Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan desa serta memperhatikan luas wilayah kedua, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas.
- d. Tugas kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Kewenangan Desa yang diatur dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 pada pasal 18, yaitu:

Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.

Dan dijelaskan pada pasal 19 Undang-undang No 6 tahun 2014 Tentang Kewenangan Desa meliputi:

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. Kewenangan lokasi berskala Desa;
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah Daerah provinsi, atau pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atau beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 4 Tahun 2007 Tentang pedoman pengelolaan Kekayaan Desa pada pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 ayat 1 yang dijelaskan

- (1) Jenis kekayaan Desa terdiri atas;
 - a. Tanah kas Desa
 - b. Pasar Desa
 - c. Pasar hewan
 - d. Tambatan perahu
 - e. Bangunan Desa
 - f. Pelenangan ikan yang dikelola Desa
 - g. Lain-lain kekayaan milik Desa

Menurut Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2015 pasal 108 menyatakan:

Pengelolaan kekayaan milik Desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindah tanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kekayaan milik Desa.

- (1) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan kekayaan milik Desa.
- (2) Dalam melaksanakan kekuasaanse bagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Desadapat menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa.

Selanjutnya dalam pasal 110, menyatakan:

- (1) Pengelolaan kekayaan milik Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan meningkatkan pendapatan Desa.
- (2) Pengelolaan kekayaan milik Desa diatur dengan peraturanDesa dengan berpedoman pada Peraturan Menteri

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Penamaan Desa Menjadi Kampung pasal 3 menyatakan:

- (1) Susunan pemerintah kampung terdiri dari:
 - a. Penghulu
 - b. Perangkat Kampung
- (2) Perangkat kampung sebagaimana dimaksud pada pasal (1) huruf b terdiri dari:

- a. Sekretariat Kampung
 - b. Unsur kewilayahan; dan
 - c. Pelaksanaan teknis lapangan
- (3) Sekretariat kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari:
- a. Kerani sebagai pemimpin sekretariat
 - b. Juru tulis, staf, atau unsur pembantu kerani
- (4) Unsur kewilayahan yang dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah pembantu Penghulu yang mengepalai Dusun, Rukun Kampung, dan Rukun Tetangga
- (5) Pelaksana teknis lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c melaksanakan tugas tertentu dalam kepenghuluan seperti urusan agama, keamanan, pengairan, pertanian, pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau urusan lain yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

Salah satu upaya pemanfaatan sumberdaya lokal yang optimal adalah dengan mengembangkan pariwisata dengan konsep ekowisata. Dalam konteks ini wisata yang dilakukan memiliki bagian yang tidak terpisahkan dengan upaya-upaya konservasi, pemberdayaan ekonomi lokal dan mendorong respek yang lebih tinggi terhadap perbedaan kultur atau budaya. Hal inilah yang mendasari perbedaan antara konsep ekowisata dengan model wisata konvensional yang telah ada sebelumnya.

Adapun arti penting atau konsep dari ekowisata adalah sebagai berikut:

1. Konservasi alam
2. Pemberdayaan masyarakat lokal
3. Meningkatkan kesadaran lingkungan hidup

Secara sederhana, konsep ekowisata menghubungkan antara perjalanan wisata alam yang memiliki visi dan misi konservasi dan kecintaan lingkungan. Hal ini dapat terjadi karena keuntungan finansial yang didapat dari biaya

perjalanan wisata digunakan juga untuk kebutuhan konservasi alam serta perbaikan kesejahteraan penduduk lokal. Di sisi lain, konsep ekowisata juga diarahkan untuk mempertahankan kebudayaan lokal serta tidak melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) dan pergerakan demografi. Pergeseran konsep kepariwisataan dunia ke model ekowisata, disebabkan karena kejenuhan wisatawan untuk mengunjungi obyek wisata buatan. Oleh karena itu peluang ini selayaknya dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk menarik wisatawan asing mengunjungi objek berbasis alam dan budaya penduduk lokal.

Kabupaten Siak adalah sebuah kabupaten yang terdiri dari 14 Kecamatan dan merupakan salah satu destinasi wisata di Provinsi Riau. Kabupaten Siak merupakan wilayah yang kaya akan potensi alam, nilai sejarah, seni dan budaya, serta memiliki beragam potensi pariwisata yang dapat dikembangkan untuk tujuan pelestarian sejarah, seni dan budaya melayu, serta pembangunan ekonomi lokal.

Kecamatan Sungai Apit adalah salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Siak. Kecamatan Sungai Apit yang posisi pusat pemerintahannya ada di Kelurahan Sungai Apit yang kurang lebih jarak lurusnya 37 km dari pusat pemerintahan kabupaten yang dapat ditempuh melalui darat maupun sungai. Kecamatan Sungai Apit secara umum berada pada daerah aliran sungai siak serta di sebagian tempat merupakan pantai landai yang berhadapan dengan Pulau Tebing Tinggi dan Pulau Padang wilayah Kabupaten Bengkalis (Badan Pusat Statistik Kabupaten Siak, 2016). Kecamatan Sungai Apit memiliki luas 220.005 Ha. Kecamatan Sungai Apit terdiri dari 1 kelurahan dan 14 desa, yang mana desa

di Kecamatan Sungai Apit di dominasi oleh pantai yang jumlah luas nya adalah 220.005 Ha. Salah satunya adalah Kampung Sungai Rawa.

Berikut kampung-kampung yang berada di Kecamatan Sungai Apit:

Tabel I.1 Kampung-kampung yang berada di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak

No	Nama Kampung	Luas Wilayah (Ha)
1.	Bunsur	6.150
2.	Harapan	1.670
3.	Sungai Kayu Ara	6.106
4.	Sungai Kayu Ara Permai	6.280
5.	Lalang	9.064
6.	Mengkapan	11.327
7.	Penyengat	43.732
8.	Sungai Rawa	24.740
9.	Rawa Mekar Jaya	16.803
10.	Tanjung Kuras	12.960
11.	Teluk Batil	1.050
12.	Teluk Lanus	55.000
13.	Teluk Mesjid	5.030
14.	Parit I/II	10.000
Jumlah		220.005

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Siak, 2016

Sungai Rawa adalah desa yang berada di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak, desa ini terbagi atas 3 dusun, 18 rukun tetangga dan 6 rukun warga. Jumlah penduduk kampung Sungai Rawa. adalah 1.529 Jiwa.

Kampung Sungai Rawa terletak dalam wilayah Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak yang berbatas dengan:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Mengkapan
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Panjang
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Rawa mekar Jaya
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Dosan Kecamatan Pusako

Luas wilayah kampung Sungai Rawa adalah 241.743 Ha dimana geografi berupa daratan yang bertopografi datar, dan 150 Ha daratan dimanfaatkan sebagai lahan pertanian yang dimanfaatkan untuk penyesuaian iklim kampung Sungai Rawa.

Penduduk Kampung Sungai Rawa berasal dari daerah yang berbeda-beda, dimana mayoritas penduduknya yang paling dominan berasal dari Melayu sehingga tradisi-tradisi musyawarah untuk mufakat, gotong royong dan kearifan lokal yang lain sudah dilakukan oleh masyarakat sejak adanya Kampung Sungai Rawa dan hal tersebut secara efektif dapat menghindari adanya benturan antar kelompok masyarakat.

Adapun kampung-kampung yang memiliki potensi ekowisata mangrove yang telah dikelola adalah sebagai berikut:

Tabel I.2 Jumlah Kampung Yang Memiliki Potensi Mangrove di Kabupaten Siak

No	Nama Kampung	Luas Wilayah (Ha)
----	--------------	-------------------

1.	Sungai Rawa	24.740
2.	Rawa Mekar Jaya	16.803
3.	Mengkapan	11.327
4.	Pebadaran, Pusako	6.280

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Siak 2016

Adapun alasan penulis meneliti di Kampung Sungai Rawa adalah berangkat dari permasalahan yang penulis temukan, penulis ingin mengetahui seberapa besar pengaruh dari permasalahan tersebut berdampak pada wisata ini, seberapa besar pengaruh perekonomian desa maupun perekonomian masyarakat desa dengan dikembangkannya ekowisata mangrove ini, selanjutnya penulis ingin mengetahui upaya apa saja yang dilakukakn oleh Pemerintahan Desa dalam Pengembangan ekowisata mangrove dan hambatan-hambatan yang akan ditemukan oleh Pemerintah Desa dalam upaya pengembangan.

Empat (4) dari Empat Belas (14) Kampung yang ada di Kecamatan Sungai Apit berada dalam keadaan geografis pantai, salah satu nya adalah Kampung Sungai Rawa. Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa Kampung Sungai Rawa cocok menjadi wisata alam yang ada di Kecamatan Sungai Apit. Karena desa yang berada dalam keadaan pantai dan struktur tanah yang berada di Kecamatan Sungai Apit adalah tanah podsolik merah kuning dari batuan dan aluvial serta tanah organosol dan gley humas dalam bentuk rawa-rawa atau tanah basah, maka Kampung Sungai Rawa cocok dijadikan Ekowisata Mangrove (Jurnal: Putri Pauziah 2016). Apabila ekowisata mangrove dapat di kolola dengan

baik hal ini akan bisa menarik wisatawan dan dapat meningkatkan perekonomian desa.

Tetapi dari potensi yang ada masih banyak kekurangan yang terdapat didalamnya yaitu:

- a. Akses/jalan menuju ekowisata mangrove belum sepenuhnya baik, karena masih ada beberapa jalan yang masih berlubang dan berdebu
- b. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung di ekowisata mangrove, seperti kurangnya lahan parkir, tidak ada tempat ibadah dan tidak ada tersedia tempat sampah sehingga masih sering terlihat sampah-sampah disekitaran mangrove serta kurangnya tempat makan atau kantin disekitaran tempat wisata.
- c. Kurangnya pemanfaatan sungai yang ada di tempat wisata yang seharusnya dapat dijadikan tempat pemancingan berbayar dan belum adanya kejelasan tentang tarif masuk dan tarif parkir.

2. Rumusan Masalah

Dari pernyataan yang penulis paparkan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian penulis, yaitu: **“Bagaimana Upaya Pemerintah Kampung Dalam Pengembangan Ekowisata Mangrove Di Kampung Sungai Rawa Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak?”**

3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui upaya pemerintah kampung dalam mengembangkan ekowisata mangrove di Kampung Sungai Rawa

2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam upaya mengembangkan ekowisata mangrove oleh pemerintah Kampung Sungai Rawa

b. Manfaat Penulisan

1. Secara akademis penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian terutama yang berkaitan dengan Strategi Pengembangan Ekowisata Mangrove Dalam Meningkatkan Perekonomian Desa
2. Sebagai bahan masukan dan bahan pertimbangan bagi pemerintah desa dalam Mengembangkan Ekowisata Mangrove Dalam Meningkatkan Perekonomian Desa
3. Sebagai wadah bagi penulis dalam menerapkan ilmu yang telah di peroleh selama mengikuti perkuliahan pada program Studi Ilmu Pemerintahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Studi Kepustakaan

Untuk memperjelas konsep dalam penelitian ini, maka penulis mengkaitkan beberapa pendapat dan teori sesuai dengan judul penelitian. Teori-teori yang digunakan merupakan rangkian penelitinn yang akan dihubungkan pada pemerintahan.

1. Teori Pemerintahan

Menurut Syafie (2013:12) ilmu pemerintahann adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan koordinasi dan kemampuan memimpin bidang legislatif, eksekutif, dan yudiktif dalam hubungan pusat daerah, antara lembaga serta antara yang memerintah dan yang diperintah.

Ilmu pemerintahan ini di definisikan oleh Ndraha (2011:7) adalah sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa pubik dan layanan civil, dalam hubungan pemerintahan, (sehingga dapat di terima) pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan.

Ilmu pemerintahan mempelajari pemerintah dari sudut, pertama dari sudut bagaimana seharusnya (“sehingga dapat di terima oleh yang bersangkutan pada saat di butuhkan”). Berdasarkan dari definisi itu dapat dikonstruksikan ruang lingkup ilmu pemerintahan yaitu terdiri dari :

1. Yang di perintah
2. Tuntutan yang di perintah (jasa publik dan layanan civil)

3. Pemerintah
4. Kewenangan, kewajiban, dan tanggung jawab pemerintah
5. Hubungan pemerintahan

Selain itu Hamadi juga menerangkan Ilmu pemerintahan mempunyai objek material dan objek formal ilmu pemerintahan dengan sub-subnya. Hubungan antara pusat dan daerah, hubungan antara yang memerintah dengan yang di perintah, hubungan antara lembaga serta departemen. Termasuk pembahasan output pemerintahan sebagai fungsi, sistem, aktivitas, kegiatan, gejala, perbuatan serta peristiwa elit pemerintahan yang berkuasa. (dikutip Azla 2015:15)

Secara etimologi pemerintahan dapat di artikan sebagai berikut :

1. Perintah berarti melakukan pekerjaan menyeluruh. Terdiri dari dua unsur, rakyat dan pemerintah, yang keduanya ada hubungan.
2. Setelah di tambah awalan pe- menjadi pemerintah yang berarti badan atau organisasi yang mengurus.
3. Setelah ditambahkan akiran an- menjadi pemerintahan, yang berarti perbuatan, cara atau perihal.

Talidzu Ndraha (dalam Awang dan Mendra Wijaya, 2012:7) juga menjelaskan bahwa pemerintah adalah alat perlengkapan negara atau lembaga-lembaga kenegaraan yang berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan negara.

Pemerintah juga merupakan kegiatan lembaga-lembaga publik dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan negara, dan yang menjalankan pemerintahan. secara umum tugas-tugas pokok pemerintahan menurut Rasyid (2000:13) antara lain :

Menjami keamanan Negara dari segala kemungkinan serangan dari luar dan menjaga tidak terjadi pemberontakan di dalam yang dapat menggulingkan pemerintahan yang sah melalui kekerasan.

Dalam kesimpulannya, Syafie (2013:27) menyebutkan bahwa ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana menjalankan pemerintahan secara baik dan benar dalam arti hubungan penguasa dengan rakyatnya dapat berlaku kebenaran sepanjang rakyat harus di tertibkan, sedangkan harus baik melayani sepanjang rakyatnya tidak dekandasi moral.

Fungsi pemerintah secara umum adalah: (Musaneff,1992:22)

1. Menetapkan pelaksanaan serta penyelenggaraan segala urusan pemerintahan.
2. Pembangunan, dan
3. Pembinaan masyarakat

Selain itu dapat juga diketahui bahwa penyelenggaraan pemerintahan adalah sebagaimana melaksanakan pengurusan dan pengaturan, baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah sampai ke desa dan kelurahan dalam berbagai peristiwa dan segala pemerintahan secara baik dan benar (Syafiie,1998:53).

Menurut Admosudiro (1989:183), Management Pemerintahan adalah management yang merupakan lanjutan langsung dari pada pemerintahan atau tindak pemerintahan (*governmentla act*) yakni misalnya management dari pada government staff work, management kepolisian, management dari pada legal drafting (penaskahan berbagai undang-undang, peraturan pemerintahan dan sebagainya).

2. Teori Pemerintah Desa

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.

Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu kepala desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat desa, dan unsur pendukung tugas kepala desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan. Perangkat Desa terdiri dari:

- a. Sekretaris Desa
- b. Kepala Urusan Umum
- c. Kepala Urusan Keuangan
- d. Kepala Urusan Pemerintahan
- e. Kepala Urusan Ekonomi Pembangunan
- f. KAUR KESRA (Kesejahteraan Rakyat)
- g. Kepala Dusun (KADUS)
- h. BPD (Badan Perwakilan Desa)

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa pada pasal 26 disebutkan:

- (1) Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Desa berwenang:
 - a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa
 - c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa
 - d. Menetapkan peraturan Desa
 - e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
 - f. Membina kehidupan masyarakat Desa
 - g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat
 - h. Membina ketenytraman dan ketertiban masyarakat Desa
 - i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa
 - j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa
 - k. Mengembangkan kehidupan social budaya masyarakat Desa
 - l. Memanfaatkan teknologi cepat guna
 - m. Mengoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif
 - n. Mewakili Desa dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hokum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan
 - o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Widjaja, (2003:3) Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa.

Sedangkan menurut Yulianti, (2003:24) Desa adalah tempat asal, tempat tinggal negara asal, atau tanah leluhur yang merajuk pada kesatuan hidup, dengan kesatuan norma serta memiliki batas yang jelas.

Menurut Bintarto dalam Wasistiono & Tahir 2006:10-11) unsur-unsur yang harus ada dalam suatu desa dalah:

1. Daerah, dalam arti tanah-tanah yang produkti dan yang tidak produktif merupakan lingkungan geografis setempat

2. Penduduk, adalah hal yang meliputi jumlah, pertumbuhan, kepadatan, persebaran dan mata pencaharian penduduk desa setempat
3. Tata kehidupan, dalam hal ini pola tata pergaulan dan ikatan-ikatan pergaulan warga desa.

Kebijakan pengembangan otonomi desa merupakan bagian yang terpisahkan dari kebijakan umum pembangunan pemerintah Kabupaten/kota, Provinsi dan Nasional, yang telah dituangkan dalam berbagai dokumen perencanaan, baik jangka panjang, jangka menengah maupun jangka pendek. Dalam rangka mewujudkan akselerasi tersebut, dilaksanakan melalui 4 misi yang dirumuskan sebagai berikut:

(Wasistiono & Tahir, 2006:98)

- a. Meningkatkan kapasitas tata kepemimpinan
- b. Meningkatkan kapasitas tata pemerintahan desa
- c. Meningkatkan kapasitas tata kemasyarakatan
- d. Meningkatkan kapasitas tata ruang dan lingkungan

Misi peningkatan kapasitas tata pemerintahan desa ditempuh melalui kebijakan:

- a. Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa

1. Optimalisasi pelaksanaan kewenangan yang dimiliki desa, melalui program:

- a) Identifikasi dan klasifikasi kewenangan yang dimiliki oleh desa
- b) Penyusunan perangkat legislasi dan petunjuk pelaksanaan tentang kewenangan desa

- c) Sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan tugas pembantuan dari pemerintah supra desa kepada desa
2. Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah desa, melalui program:
 - a) Penataan organisasi pemerintah desa
 - b) Optimalisasi ketatalaksanaan administrasi pemerintahan desa
 - c) Pengembangan budaya organisasi pada pemerintahan desa
 3. Peningkatan pembinaan aparat pemerintahan desa, melalui program:
 - a) Penataan personil pemerintahan desa
 - b) Peningkatan kualitas SDM aparat desa melalui pendidikan dan pelatihan
 - c) Pengembangan kompetensi perangkat desa
 4. Peningkatan efektivitas dan optimalisasi penerimaan dan pengelolaan keuangan desa, melalui program:
 - a) Pelimpahan kewenangan bidang pajak dan retribusi daerah (yang kurang efisien) kepada desa
 - b) Pengembangan Usahan Milik Desa
 - c) Peningkatan kompetensi pengelolaan keuangan bagi aparat desa
 - d) Penyempurnaan perangkat peraturan dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan dan pengawasan alokasi keuangan desa
 - e) Penyempurnaan manajemen dan sistem penganggaran serta pertanggungjawaban keuangan desa
 5. Peningkatan ketersediaan optimalisasi pemanfaatan perlengkapan/sarana dan prasarana pemerintah desa, melalui program:
 - a) Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana pemerintah desa untuk penunjang pelayanan kepada masyarakat

- b) Pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung penyelenggaraan pemerintah desa

6. Peningkatan epektifitas fungsi perencanaan , melalui program:

- a) Optimalisasi fungsi perencanaan dalam penelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa
- b) Optimalisasi pelaksanaan fungsi LPMD sebagai lembaga perencanaan pembangunan ditingkat desa

7. Peningkatan efektivitas pengawasan, melalui program:

- a) Peningkatan efektivitas pengawasan pemerintah supra desa
- b) Peningkatan efektivitas pengawasan masyarakat dan lembaga-lembaga kemasyarakatan

8. Pendayagunaan fungsi dokumentasi dan kearsipan, melalui program:

- a) Peningkatan kualitas ketatalaksanaan dan ketatausahaan administrasi desa
- b) Peningkatan kualitas pengarsipan administrasi desa

b. Peningkatan Kapasitas BPD

1. Peningkatan fungsi artikulasi dan agregasi BPD sebagai lembaga permusyawaratan di tingkat desa, melalui program:

- a) Optimalisasi tugas pokok dan fungsi BPD
- b) Optimalisasi pelaksanaan fungsi perwakilan BPD

2. Mengoptimalkan fungsi legislasi BPD sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa, melalui program:

- a) Peningkatan kemampuan dan pengetahuan legislasi anggota BPD
- b) Sosialisasi program legislasi daerah

Meurut Sunarjo dalam Wasistiono & Tahir (2006:8), susunan desa-desa membentuk persekutuan masyarakat hukum dikategorikan atas 3 tipe, yaitu:

1. Tipe kesatuan masyarakat hukum erdasarkan kepada teritorial/wilayah tempat bersama sebagai dasar utama
2. Tipe kesatuan masyarakat umum berdasarkan persamaan keturunan/genetik (suku, warga atau calon) sebagai dasar utama untuk dapat bertempat tinggal dalam suatu wilayah tertentu
3. Tipe kesatuan hukum berdasarkan atas campuran (teritorial dan keturunan)

3. Teori Pengembangan

Ada beberapa pendapat para ahli tentang arti dari pengembangan. Menurut Suwanto (1997:120) pengembangan bertujuan untuk mengembangkan produk dan pelayanan yang berkualitas, seimbang dan bertahap. Sedangkan Poerwadarminta (2002:474). Lebih menekankan kepada suatu proses atau suatu cara menjadikan sesuatu menjadi maju, baik sempruna dan berguna.

Pengembangan adalah suatu proses penilain sendiri dan perubahan perencanaan atas dasar sistem nilai tertentu. Indrawijaya (1989 : 23)

Disamping itu pengembangan pariwisata bertujuan untuk memberikan keuntungan bagi wisatawan maupun komunitas tuan rumah. Dengan adanya pembangunan pariwisata diharapkan mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui keuntungan secara ekonomi yang dibawa ke kawasan tersebut. Dengan kata lain pengembangan pariwisata memlalui penyediaan fasilitas infrastruktur, wisatawan dan penduduk setempat akan saling diuntungkan.

Pengembangan tersebut hendaknya sangat memperhatikan berbagai aspek, seperti: aspek budaya, sejarah dan ekonomi daerah tujuan wisata. Pada dasarnya pengembangan pariwisata dilakukan untuk memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan permasalahan (Mill, 2000:168).

Menurut Joyosuharto (1995:123), pengembangan pariwisata memiliki tiga fungsi yaitu: (1) menggalakkan ekonomi, (2) memelihara kepribadian bangsa & kelestarian fungsi dan mutu lingkungan hidup, (3) memupuk rasa cinta tanah air bangsa.

4. Teori Ekowisata

Ekowisata adalah suatu jenis pariwisata yang berwawasan lingkungan dengan aktivitas melihat, menyaksikan, mempelajari, mengagumi alam, flora dan fauna, sosial-budaya etnis setempat dan wisatawan yang melakukannya ikut membina kelestarian lingkungan alam disekitarnya dengan melibatkan penduduk lokal (Yoeti, 2000).

Ekowisata adalah suatu perpaduan berbagai minat yang tumbuh dari rasa keprihatinan lingkungan, ekonomi dan sosial. Ada beberapa pandangan yang sering digunakan antara lain: *natural based tourism*, *green travel*, *responsible travel*, *low Impact tourism*, *village based tourism*, *sustainable tourism*, *cultural tourism*, *heritage tourism*, *rural tourism* (Carter dan Lowman, 1994). Masyarakat Ekoturisme Internasional (IES) memberikan definisi ekowisata (*ecotourism*) adalah suatu bentuk perjalanan yang bertanggung jawab ke daerah alami yang lingkungannya dilindungi dan mampu meningkatkan kesejahteraan penduduk lokal (Sunaryo, 2001). Sedangkan menurut Buckley (1994), menyatakan ada

empat gambaran perjalanan yang umumnya berlabelkan ekowisata yaitu: (a) wisata berbasis alamiah (*nature-based tourism*), (b) kawasan konservasi sebagai pendukung objek wisata (*conservation supporting tourism*), (c) wisata yang sangat peduli lingkungan (*environmentally aware tourism*), dan (d) wisata yang berkelanjutan (*sustainably run tourism*).

Ekowisata dalam teori dan praktiknya tumbuh dari kritik terhadap pariwisata massal, yang dipandang merusak terhadap landasan sumber dayanya. Yaitu lingkungan dan kebudayaan. Kritik ini melahirkan berbagai istilah baru, antara lain adalah pariwisata alternatif, pariwisata yang bertanggung jawab, pariwisata berbasis komunitas, dan ekowisata (Aoyama, 2000). Alasan umum penggunaan konsep ini adalah karena dapat menggambarkan pariwisata yang termasuk

- a. Bukan pariwisata berskala besar/massal
- b. Mengikuti prinsip-prinsip berkelanjutan
- c. Mempererat hubungan antara bangsa

Honey's dalam *Ecotourism and Sustainable Development*, menemukan bahwa ada 7 prinsip-prinsip ekowisata:

1. Perjalanan ke suatu tempat yang alami (*involves travel to natural destinations*), sering tempat tersebut jauh, ada penduduk atau tidak ada penduduk, dan biasanya tempat tersebut dilindungi.
2. Meminimalkan dampak negatif (*minimized impact*). Pariwisata menyebabkan kerusakan, tetapi ekoturisme berusaha untuk

meminimalkan dampak negatif yang bersumber dari hotel, jalan atau infrastruktur lainnya. Meminimalkan dampak negatif dapat dilakukan melalui pemanfaatan material sumberdaya setempat yang dapat didaur ulang. Sumber energi yang diperbaharui, pembangunan dan pengolahan limbah dan sampah yang aman, dan menggunakan arsitektur yang sesuai dengan lingkungan (lanskap) dan budaya setempat, serta memberikan batas atau jumlah wisatawan sesuai daya dukung obyek dan pengaturan perilakunya.

3. Membangun kepedulian terhadap lingkungan (*build enviromenlawareness*). Unsur penting dalam ekoturisme adalah pendidikan, baik kepada wisatawan maupun masyarakat penyangga obyek. Sebelumnya semua pihak yang terintegrasi dalam perjalanan wisata alam harus di bekali informasi tentang karakteristik obek dan kode etik sehingga dampak negatif dapat diminimalkan.
4. Memberikan bebrapa manfaat finansial secara langsung pada kegiatan konservasi (*provides direct finansial benefits and empowerment for conservation*). Ekoturisme dapat membantu meningkatkan perlindungan lingkungan, penelitian dan pendidikan, melalui mekanisme penarikan biaya masuk dan sebagainya.
5. Memberikan manfaat/keuntungan finansial dan pemberdayaan pada masyarakat lokal (*providesfinansial benefits and empowerment for local people*). Masyarakat kan merasa memiliki dan peduli terhadap

kawasan konservasi apabila mereka mendapatkan manfaat yang menguntungkan baik secara langsung maupun tidak langsung. Keberadaan ekoturisme di suatu kawasan harus mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.. manfaat finansial dapat di maksimalkan melalui pemberdayaan atau peningkatan kapasitas masyarakat lokal, baik dalam pendidikan, wirausaha, pemodalan dan manajemen.

6. Menghormati budaya setempat (*respect local culture*). Ekoturisme disamping lebih ramah lingkungan, juga tidak bersifat destruktif, intusif, polutan dan eksploitatif terhadap budaya setempat, yang justru merupakan salah satu “core” bagi pengembangan kawasan ekoturisme.
7. Mendukung gerakan hak asasi manusia dan demokrasi (*support human right and democratic movements*).

Secara konseptual ekowisata dapat didefinisikan sebagai suatu konsep pengembangan pariwisata berkelanjutan yang bertujuan untuk mendukung upaya-upaya pelestarian lingkungan (alam dan budaya) dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan, sehingga memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat setempat. Sementara ditinjau dari segi pengelolaanya, ekowisata dapat didefinisikan sebagai penyelenggaraan kegiatan wisata yang bertanggung jawab di tempat-tempat alami dan atau daerah-daerah yang dibuat berdasarkan kaidah alam dan secara ekonomi berkelanjutan yang mendukung upaya-upaya pelestarian

lingkungan (alam dan budaya) dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

5. Teori Ekowisata Mangrove

International Ecotourism Society (1990), mendefinisikan bahwa Ekowisata merupakan suatu bentuk perjalanan wisata yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang ke area alami yang dilakukan dengan tujuan mengkonservasi lingkungan dan melestarikan kehidupan dan kesejahteraan penduduk setempat.

Mangrove merupakan kombinasi antara bahasa portugis “*mangue*” dan bahasa inggris “*grove*” (Macnae, 1968 dalam Kusmana et al, 2003). Dalam bahasa inggris kata “*mangrove*” digunakan untuk komunitas tumbuhan yang tumbuh di daerah jangkauan pasang surut (terutama di daerah pantai yang terlindung, laguna, muara sungai) yang tergenang pada saat pasang dan bebas dari genangan pada saat surut dan komunitas tumbuhnya bertoleransi terhadap garam (Kusmana, et al., 2003 dalam Setiawan H., 2011).

Jadi Ekowisata Mangrove dapat diartikan sebagai suatu bentuk perjalanan wisata ke area mangrove yang masih alami dengan tujuan mengkonservasi lingkungan dan melestarikan kehidupan dan kesejahteraan penduduk setempat.

6. Teori Pembangunan

Pembangunan dapat diartikan berbeda-beda oleh setiap orang tergantung dari sudut pandang apa yang digunakan oleh orang tersebut. Perbedaan cara pandang mengenai pembangunan yang dilakukan akan menyulitkan kepada kita tentang seberapa maju proses pembangunan yang dilakukan di sebuah daerah.

Pembangunan merupakan pertambahan pendapatan masyarakat secara keseluruhan yang terjadi di wilayah tersebut, yakni kenaikan seluruh nilai tambah (*added value*) yang terjadi.

Pembangunan bukan semata-mata merupakan fenomena ekonomi. Dalam pengetahuan yang paling mendasar, pembangunan haruslah mencakup masalah materil dan finansial dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu pembangunan seharusnya diselidiki sebagai suatu proses multimediasional yang melibatkan reorganisasi dan reorientasi dari semua sistem ekonomi dan sosial (Todaro 2000:25).

Pembangunan adalah mengadakan atau membuat atau mengatur sesuatu yang belum ada, yang dilakukan untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan tersebut dapat merupakan pembangunan fisik dan dapat merupakan pembangunan sosial ekonomi. Sedangkan pembangunan regional meliputi suatu wilayah dan mempunyai tekanan utama pada perekonomian dan tekanan berikutnya pada keadaan fisik, sehingga merupakan gabungan dari kedua hal tersebut diatas. Pembangunan meliputi tiga kegiatan yang saling berhubungan (Jayadinata, 1994:42), yaitu: pertama, menimbulkan peningkatan kemakmuran dan peningkatan pendapatan serta kesejahteraan sebagai tujuan, dengan tekanan perhatian pada lapisan terbesar (dengan pendapatan terkecil) dalam masyarakat. Kedua, memilih metode yang sesuai untuk mencapai tujuan tersebut. Ketiga, menyusun kembali (*restructuring*) masyarakat dengan maksud supaya timbul pertumbuhan sosial ekonomi yang kuat.

Berdasarkan skalanya, pembangunan dapat mempunyai skala nasional, regional atau lokal. Pembangunan nasional meliputi seluruh negara dengan tekanan pada perekonomian. Pembangunan lokal meliputi kawasan kecil dengan tekanan pada keadaan fisik. Sedangkan pembangunan regional meliputi suatu wilayah dan mempunyai tekanan utama pada perekonomian dan tekanan kedua pada keadaan fisik, sehingga merupakan dari kedua hal diatas (Jayadinata, 1999:45)

(Todaro, 2004:24) dalam konteks pembangunan nasional maupun daerah, pembangunan yang dilakukan sebagai suatu pembangunan ekonomi, hal tersebut dapat dibenarkan karena pembangunan bukan hanya berarti penekanan pada akselerasi dan peningkatan dalam pertumbuhan perkapita sebagai indeks dari pembangunan, tetapi pembangunan merupakan suatu proses multidimensial yang meliputi pula reorganisasi dan pembaharuan seluruh sistem dan aktifitas ekonomi dan sosial dalam mensejahterakan kehidupan masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas dapat dijelaskan bahwa pembangunan adalah suatu proses yang luas yang menyangkut dimensi sosial, ekonomi, fisik, politik, budaya dan sebagainya. Namun dari dimensi-dimensi tersebut yang paling berpengaruh adalah dimensi ekonomi. Kemajuan ekonomi adalah suatu komponen yang esensial dari pembangunan, walalupun bukan satu-satunya. Oleh karena itu pembangunan diartikan sebagai pembangunan ekonomi. Yang didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk meningkat dalam jangka panjang (Sukirno, 2005:34).

7. Teori Manajemen Pemerintahan

Istilah manajemen dari bahasa Inggris *managemnt*. Istilah ini terbentuk dari akar kata *manus*, tangan, yang berkaitan dengan kata *managerie* yang berarti beternak. *Mangaria* juga berarti sekumpulan binatang liar yang dikendalikan didalam pagar. Kata *Manus* berkaitan dengan kata *manage* yang berasal dari bahasa latin *mansionaticum* yang berarti pengelolaan rumah besar. Manajemen mempelajari bagaimana menciptakan effectiveness usaha (doing right things) secara efficient (doing things right) dan produktif, melalui fungsi dan siklus tertentu, dalam rangka mencapai tujuan organisasional yang telah ditetapkan. Jadi unsur-unsur manajemen adalah:

- a. Tujuan organisasional yang telah ditetapkan oleh lembaga atau pejabat yang berkompeten'
- b. Fungsi, perencanaan usaha termasuk penetapan output dan outcome yang dikehendaki, pengorganisasian sumber-sumber agar siap pakai/gerak, penggerakan/penggunaan sumber-sumber guna menghasilkan output, dan kontrol penggerakan/ penggunaan sumber-sumber supaya output dan outcome yang dihasilkan/dinikmati konsumen sesuai dengan output/outcome yang diharapkan.
- c. Siklus produk yang berawal dari konsumen, dan setelah melalui beberapa rute, berakhir pada konsumen.

Sedangkan Terry (dalam Sarwanto 1999,62-63) mengatakan ada empat fungsi rangkaian pokok kegiatan manajemen yaitu:

- a) *Planning* adalah menetapkan apa yang harus dilaksanakan oleh anggota-anggota organisasi untuk menyelesaikan pekerjaan, dalam fase ini perlu ditetapkan oleh manajer bila dan bagaimana pekerjaan ini dilakukan.
- b) *Organizing* adalah mendistribusikan atau mengalokasikan tugas-tugas kepada para anggota kelompok, mendelegir kekuasaan dan menetapkan hubungan kerja antar anggota kelompok.
- c) *Actuating* adalah setelah kegiatan *planning* dan *organizing*, manajer perlu dapat menggerakkan kelompok secara efisien dan efektif ke arah pencapaian tujuan.
- d) *Controlling* adalah dalam organisasi bergerak atau berjalan, manajer harus selalu mengadakan pengawasan atau pengendalian agar gerakan atau berjalannya organisasi benar-benar sesuai rencana yang telah ditetapkan baik mengenai arahnya maupun mengenai caranya.

Menurut Ott Hyde dan Shafrits (1991:10) Manajemen Pemerintahan adalah bagian utama dari bidang kajian Administrasi Negara yang sangat luas, Manajemen Pemerintahan berkaitan dengan fungsi-fungsi dan proses-proses manajemen pada bagian disemua tingkatan pemerintahan sebagai sektor nirlaba.

Dalam Wasistiono (2001:12) ada 5 kecenderungan berbicara tentang Manajemen pemerintahan yaitu:

1. Dilihat dari peranan pemerintahan
2. Dilihat dari visi dan misi
3. Dilihat dari fungsi-fungsi manajemen

4. Dilihat dari fungsi organisasi
5. Dilihat dari kepemimpinan

Menurut Clinton (dalam Wasistiono 2001) penyelenggaraan pemerintahan yang dikreasikan sebagai instrumen kepentingan masyarakat kembali pada nilai-nilai fundamental. Manajemen pemerintahan Indonesia pada abad 21 harus tetap berpegang pada nilai-nilai fundamental agar tidak kehilangan jati diri sebagai bangsa. Berbagai asas, teori maupun konsepsi pemikiran yang berlaku pada manajemen secara umum dapat pula digunakan untuk manajemen pemerintahan Indonesia dengan rambu-rambu Pancasila sebagai nilai fundamental.

Manajemen Pemerintahan menurut Rasyid (2000:148) adalah manajemen yang diarahkan agar terlebih dahulu merumuskan hasil apa atau dengan kata lain tujuan apa yang dicapai dengan ruang, peralatan, keahlian dan tenaga kerja yang kemudian dilaksanakan. Selanjutnya hasil akan di evaluasi untuk menentukan apakah tujuan itu tercapai atau tidak. Manajemen pemerintahan juga menganut prinsip-prinsip seperti manajemen pada umumnya yaitu efisiensi, efektivitas, dan inovasi dalam proses menghimpun dan menggerakkan orang-orang, memperoleh dan menggunakan uang, serta mengadakan, mempergunakan dan memelihara peralatan demi tercapai tujuan organisasi.

8. Teori Pariwisata

Pariwisata menurut Pendit (2006:32) adalah salah satu jenis industri baru yang mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam menyediakan lapangan kerja, peningkatan penghasilan, standar hidup serta menstimulasi sektor-sektor produktivitas lainnya.

Menurut Yoeti (2006:118) pariwisata adalah suatu perjalanan yang dilakukan untuk sementara waktu, yang diselenggarakan dari suatu tempat ketempat lain, dengan maksud bukan untuk berusaha (business) atau mencari nafkah di tempat yang dikunjungi, tetapi semata-mata untuk menikmati perjalanan tersebut guna pertamasyaan dan rekreasi atau untuk memenuhi keinginan yang beranekaragam. Pengertian lain mengatakan bahwa pariwisata merupakan sektor yang kompleks, pariwisata juga meliputi industri-industri klasik yang sebenarnya seperti industri kerajinan tangan dan cendra mata, penginapan, dan transportasi.

Untuk dapat mudah dalam memahami status kepariwisataan dalam pengembangannya sesuai dengan perubahan zaman yang selalu terjadi, maka dalam kepariwisataan perlu terlebih dahulu dipahami tentang pengertian dan kepariwisataan itu sendiri.

Kepariwisataan menurut Undang-Undang No 9 Tahun 1990 adalah:

“Kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati objek daya tarik wisata. Unsur terpenting dalam kegiatan wisata adalah tidak bertujuan mencari nafkah, tetapi apabila disela-sela kegiatan mencari nafkah itu, ia juga secara khusus melakukan kegiatan wisata, bagian dari kegiatan tersebut dianggap sebagai kegiatan wisata.”

Spillance (2001,3) juga mengatakan bahwa pariwisata adalah seluruh fenomena dari hubungan yang muncul antara wisatawan, pengusaha, pemerintah dan masyarakat daerah tujuan wisata dalam rangka menarik wisatawan atau pengunjung lain untuk tinggal di tempat wisata.

Me Intosh dan Gupta sebagaimana di terjemahkan oleh Pandit (2004,30) menjelaskan bahwa, pariwisata adalah gabungan gejala dan hubungan yang timbul

dari interaksi wisatawan, bisnis, pemerintah tuan rumah dan masyarakat tuan rumah dalam proses menarik dan melayani wisatawan ini serta pengunjung lain.

Yang dimaksud dengan turis atau wisatawan adalah setiap orang yang memenuhi 2 kondisi, yaitu:

- a. orang tersebut tidak sedang berada di tempat kediamannya selama waktu tertentu yang relative singkat.
- b. Uang yang dibelanjakan selama tidak berada ditempat kediamannya adalah uang yang dibawa dari tempat kediamannya yang bukan uang yang diperoleh dari tempat tujuan yang dikunjunginya (Ogilvie dalam Marpaung,2002,20)

Dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 1990 Tentang Kepariwisataaan, pasal 4 menyebutkan bahwa objek wisata dan daya tarik wisata terdiri dari:

- a) Objek dan daya tarik wisata ciptaan Tuhan Ynag Maha Esa, yang berwujud keadaan alam serta flora dan fauna.
- b) Objek dan daya tarik wisata budaya yang merupakan hasil karya manusia yang berwujud meseum peninggalan sejarah, taman rekrasi dan taman hiburan.
- c) Objek dan daya tarik wisata minat khusus seperti mendaki gunung, berburu, industri kerajinan, tempat perbelanjaan dan sungai air deras.

9. Teori Pengembangan Pariwisata

Sebuah destinasi dapat dikatakan akan melakukan pengembangan wisata jika sebelumnya sudah ada aktivitas wisata. Untuk dapat meningkatkan potensi pariwisatanya, yang perlu dilakukan adalah merencanakan pengembangan wisata agar dapat lebih baik dari sebelumnya. Tiga prinsip utama dalam sustainability development (McIntyre, 1993:10):

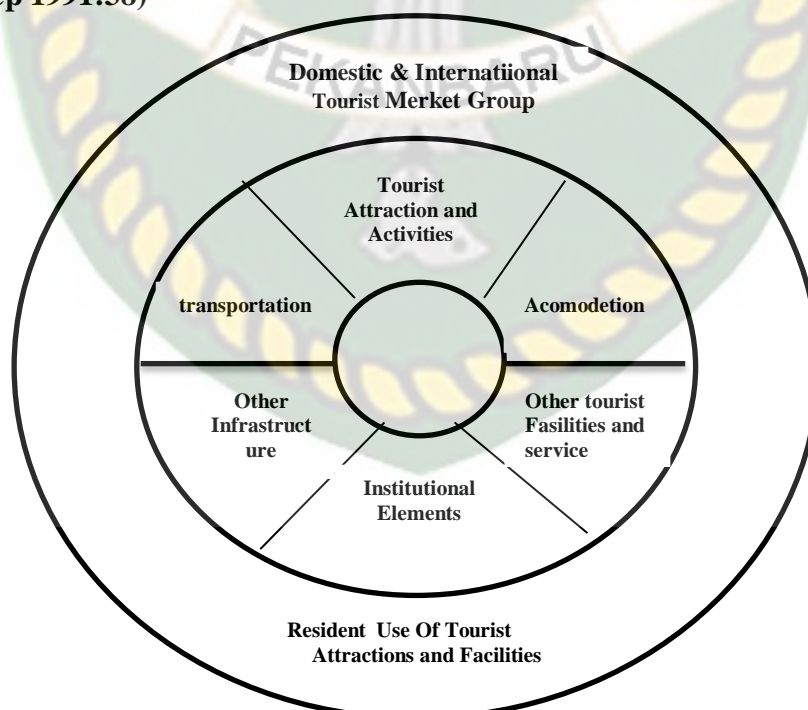
1. *Ecological Sustainability*, yakni memastikan bahwa pengembangan yang dilakukan sesuai dengan proses ekologi, biologi, dan keragaman sumber daya ekologi yang ada.

2. *Social and Cultural Sustainability*, yaitu memastikan bahwa pengembangan yang dilakukan memberi dampak positif bagi kehidupan masyarakat sekitar dan sesuai dengan kebudayaan serta nilai-nilai yang berlaku pada masyarakat tersebut.

3. *Economic Sustainability*, yaitu memastikan bahwa pengembangan yang dilakukan efisien secara ekonomi dan bahwa sumber daya yang digunakan dapat bertahan bagi kebutuhan di masa mendatang.

Sementara itu dilain hal, sektor pariwisata terdiri atas beberapa komponen yang berbeda yang harus benar-benar dimengerti dan direncanakan dan dikembangkan secara terintegrasi dalam masyarakat. Segalanya untuk kenyamanan perencanaan pariwisata dalam masyarakat itu sendiri, komponen-komponen pendekatan pengembangan pariwisata menurut Edward Inskeep (1998) dalam Marceilla Hidayat adalah sebagai berikut:

GAMBAR II.I
KOMPONEN PERENCANAAN/ PENGEMBANGAN PARIWISATA
(Inskeep 1991:38)



Dalam usaha untuk mengembangkan objek wisata perlu didukung oleh berbagai macam strategi yang dilakukan antara lain:

a) Perencanaan

Menurut Noer (2011) Aspek Perencanaan pengembangan obyek wisata alam mencakup sistem perencanaan kawasan, penataan tata ruang, standarisasi, identifikasi potensi, koordinasi lintas sektoral, pendanaan, dan sistem informasi obyek wisata alam.

Selanjutnya menurut Mondy dan Premeaux (1995) menjelaskan bahwa perencanaan merupakan proses menentukan apa yang seharusnya dicapai dan bagaimana mewujudkannya dalam kenyataan.

Salah satu fungsi manajemen yang paling utama adalah perencanaan karena dari fungsi tersebutlah fungsi-fungsi lain disusun, perencanaan merupakan cetak biru untuk pencapaian tujuan yang memuat pengalokasian sumber daya yang memuat pengalokasian sumber daya yang dibutuhkan, jadwal, tugas-tugas dan pekerjaan-pekerjaan yang harus dilaksanakan terkait dengan pencapaian tersebut.

b) Sarana dan Prasarana

Suwantoro (2007,22) mengatakan bahwa sarana wisata merupakan kelengkapan daerah tujuan wisata yang diperlukan untuk melayani kebutuhan wisatawan dalam menikmati perjalanan wisatanya.

Selanjutnya sarana kepariwisataan menurut Yoeti (1996,30) dibedakan menjadi 3 bagian yaitu:

1. Sarana pokok kepariwisataan (*Man Touring Superstructure*).

Adalah perusahaan-perusahaan yang hidup dan kehidupannya

sangat tergantung pada lalu lintas wisatawan dan travelers lainnya. Fungsinya untuk menyediakan fasilitas pokok yang dapat memberikan pelayanan bagi kepentingan wisatawan. Yang termasuk dalam sarana pokok kepariwisataan adalah agen perjalanan, transportasi pariwisata, tempat penginapan dan sebagainya.

2. Sarana pelengkap kepariwisataan (*supplementing tourism superstructure*) adalah fasilitas yang dapat melengkapi sarana pokok sedemikian rupa sehingga fungsinya dapat membuat wisatawan lebih lama tinggal ditempat objek wisata tersebut. Yang menjadi sarana pelengkap ini adalah tempat olah raga seperti lapangan golf, kolam renang, tempat fitness dan lain-lain.
3. Sarana penunjang kepariwisataan (*Supporting tourism superstructure*) adalah fasilitas-fasilitas yang yang diperlukan wisatawan yang tidak hanya melengkapi sarana pokok dan pelengkap saja, tapi fungsinya yang lebih penting agar wisatawan lebih banyak membelanjakan uangnya. Yang termasuk dalam sarana penunjang ini antara lain toko cendramata, bioskop dan lain-lain.

Dengan adanya sarana kepariwisataan, diharapkan objek pariwisata yang ada di daerah dapat menarik minat wisatawan untuk mengunjungi dan tinggal dalam jangka waktu tertentu, serta dapat menikmati pelayanan yang memuaskan dari pihak pengelola pariwisata.

c) Promosi/memperkenalkan Objek Wisata

Menurut Yoeti (1996,186) pada dasarnya promosi adalah untuk memberitahu, membujuk atau mengingatkan lebih khusus lagi, tujuannya untuk mempengaruhi melalui komunikasi agar mereka terpikirkan untuk melakukan sesuatu.

Marpaung dan Bahar (2002,103) mengatakan bahwa promosi adalah suatu upaya yang dilakukan untuk menyesuaikan produk pariwisata dengan permintaan pariwisata dengan permintaan wisatawan sehingga produk menjadi lebih menarik.

Menurut Bukhori Alma dalam Surya Dana (2015:13) promosi adalah suatu bentuk komunikasi pemasaran. Yang merupakan aktivitas pemasaran yang berusaha menyebar informasi, mempengaruhi dan membujuk mengingatkan pasar sasaran atas perusahaan dan produknya agar bersedia menerima, membeli dan loyal pada produk yang di tawarkan perusahaan yang bersangkutan.

Strategi promosi menurut Kotroler dan Armstrong (2001:74) adalah kreativitas mengkomunikasikan keunggulan produk serta membujuk pasar sasaran. Dalam sektor pariwisata strategi promosi ini penting dilakukan karena sektor pariwisata merupakan industri yang kompetitif. Dalam industri pariwisata yang berkembang pesat, persaingan-persaingan menjadi semakin tinggi, sehingga strategi promosi destinasi wisata semakin penting peranannya (Candra dan Menezes, 2001)

Selanjutnya menurut Yoeti (1996,188) alat promosi ada 3 macam yaitu:

1. *Advertising*, acara yang tepat untuk memberitahu hasil produk kepada calon konsumen yang masih belum kenal. Keuntungannya dapat menjangkau banyak orang melalui media massa seperti: surat kabar, majalah, radio, televisi dan bioskop.
2. *Sales Support*, bantuan pada penjual dengan memberikan semua materi promosi yang direncanakan untuk diberikan kepada umum seperti: brosur, poster dinding, guide book, folder dan sebagainya.
3. *Public Relations*, mempunyai tugas memelihara hubungan luar perusahaan, memberi informasi yang diperlukan sehingga masyarakat dapat mengetahui secara jelas informasi yang diberikan dan perusahaan dapat menunjukkan hubungan sosial yang baik dilingkungan masyarakat. Bentuk public relations adalah: membagi-bagi berita, konferensi pers, menjernihkan dan menyelesaikan persoalan yang ada.

d) Kemampuan sumber daya manusia

Nawawi (2003,40) mengatakan bahwa sumber manusia adalah potensi yang merupakan aset dan berfungsi sebagai modal (non material/non finansial) di dalam organisasi bisnis yang dapat di wujudkan menjadi potensi yang nyata, secara fisik dan non fisik dalam mewujudkan eksistensi organisasi.

Pentingnya peran manusia sebagai pelaksana disebabkan karena manusia merupakan unsur dinamis organisasi yang bertindak/berfungsi sebagai subjek penggerak roda organisai pemerintahan. Oleh sebab itu, kualifikasi mentalitas dan kapasitas manusia yang kurang menguntungkan bagi pelaksanaan pariwisata.

e) Kerjasama

Menurut Pamudji dalam bukunya yang berjudul “Kerjasama Antar Daerah” (1985:13). Kerjasama pada hakikatnya mengindikasikan adanya dua pihak atau lebih yang berinteraksi secara dinamis untuk mencapai suatu tujuan bersama. Ada tiga unsur pokok yang melekat dalam kerjasama, yaitu:

- a. Unsur dua pihak atau lebih
- b. Unsur interaksi
- c. Unsur tujuan bersama

Jika satu unsur itu tidak termuat dalam objek yang dikaji, dapat dianggap bahwa pada objek itu tidak terdapat kerjasama. Kerjasama senantiasa menempatkan pihak-pihak yang berinteraksi pada posisi yang seimbang, serasi dan selaras.

Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga dalam pasal (2) berbunyi:

- (1) Desa dapat mengadakan kerjasama antar desa yang dilakukan sesuai kewenangannya untuk kepentingan desa dan diatur dengan Peraturan Bersama yang dilakukan Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Desa dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga yang ditetapkan dalam peraturan bersama setelah mendapat persetujuan BPD dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat

Selanjutnya dalam pasal (3), berbunyi:

Kerjasama Desa dapat dilakukan antara:

- a. Desa dengan desa, dalam satu kecamatan

- b. Desa dengan desa, lain kecamatan
- c. Desa dengan desa lain, dalam satu kabupaten
- d. Desa dengan desa lain, lain kabupaten

Kemudian dalam pasal (4), berbunyi:

- (1) Bidang Kerjasama Desa meliputi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dalam kemasyarakatan;
- (2) Bidang Kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. Bidang Peningkatan Perekonomian Masyarakat Desa ;
 - b. Bidang Peningkatan Pelayanan Pendidikan ;
 - c. Bidang Kesehatan dan Olahraga ;
 - d. Bidang Sosial Budaya ;
 - e. Bidang Ketentraman dan Ketertiban ;
 - f. Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Tehnologi Tepat Guna dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

Dalam *publik-private partnership*, sebelumnya harus kita pahami terlebih dahulu tentang pengertian dari kata *publik* dan *private* itu sendiri. Ada beberapa pengertian tentang publik yang diketahui secara luas, diantaranya menurut Islamy (1994:10) definisi *publik* adalah:

“Pengertian publik secara tradisional tidak lagi diartikan semata-mata bersifat kelembagaan (contohnya negara), akan tetapi lebih jauh dari itu dalam hubungan dengan seberapa besar pengaruh atau kaitan lembaga tersebut dengan kepentingan publik (pelayanan pada masyarakat)”.

Hal ini berarti bahwa dalam keadaan yang bagaimanapun, pemerintah, instansi-instansi pemerintah ataupun organisasi harus dapat memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya melalui pemberian kemudahan-kemudahan pada masyarakat tanpa membedakan satu sama lain.

Dari uraian diatas maka secara umum konsep *publik-private partnership* ini dapat diartikan sebagai perjanjian dalam bentuk kontraktual antara pihak publik (federal, lembaga Negara) dengan pihak ketiga (perusahaan swasta) yang

bertindak atas dasar mencari keuntungan melalui perjanjian ini. Seluruh kemampuan dan aset dari masing-masing pihak (publik dan swasta) dikombinasikan untuk menghasilkan sebuah fasilitas yang digunakan secara luas oleh masyarakat umum.

publik-private partnership merupakan pengaturan antara pemerintah dan sektor swasta untuk menyediakan berbagai jenis pelayanan publik, seperti pembangunan infrastruktur, penyediaan fasilitas-fasilitas komunitas, dan berbagai jenis pelayanan lainnya. PPP bercirikan adanya pembagian investasi, risiko, pertanggungjawaban, dan penghargaan antara pemerintah dengan sektor swasta yang menjadi mitranya.

Konsep *publik-private partnership* merupakan bentuk kerjasama antara pemerintah dengan sektor swasta dalam menyediakan jasa, fasilitas dan infrastruktur. Karakteristik dari PPP adalah kerjasama yang didalamnya terdapat *sharing* antara pemerintah dan swasta dalam bentuk investasi, resiko, tanggung jawab dan *reward*. Kerjasama tersebut tidak dibangun pada aturan dan pola tanggung jawab yang seragam, namun biasanya bervariasi antara proyek yang satu dengan yang lain. Konsep PPP dapat pula tidak hanya dipandang dari sisi *publik* dan *private sektor* saja. Menurut UNDP pelaku PPP dapat dikembangkan menjadi tiga unsur yaitu :

1. Negara, berfungsi menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif .

2. Swasta, mendorong terciptanya lapangan kerja dan pendapatan masyarakat.

B. Penelitian Terdahulu

Tabel II.1 Penelitian Terdahulu Tentang Upaya Pemerintahan Desa Dalam Pengembangan Ekowisata Mangrove Di Kampung Sungai Rawa Kabupaten Siak

No	Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1.	Strategi Pengembangan Ekowisata Mangrove Di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak Putri Pauziah (2017)	1. Sama – sama meneliti di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak 2. Sama-sama meneliti tentang Pengembangan Ekowisata Mangrove	1. penelitian atas nama Putri Pauziah ini cakupan penelitiannya satu kecamatan, sedangkan penelitian penulis hanya fokus satu desa saja yaitu Kampung Sungai Rawa. 2. tahun penelitian Putri Pauziah tahun 2017 sedangkan penelitian penulis tahun 2018. 3. Teori yang digunakan oleh Putri Pauziah adalah teori Strategi Pengembangan menurut (Rangkuti, 2006). Sedangkan penulis menggunakan konsep pengembangan

			pariwisata menurut Edward Inskeep (1998)
2.	Strategi Perencanaan Dan Pengembangan Objek Wisata (Studi Kasus Pantai Pangandaran Kabupaten Ciamis Jawa Barat) Marceilla Hidayat	1. Sama-sama menggunakan konsep pengembangan pariwisata menurut Edward Inskeep (1998).	<p>1. Variabel penelitian atas nama Marcellia Hidayat ini adalah strategi pengembangan sedangkan variabel penelitian penulis adalah upaya pengembangan</p> <p>2. Lokasi penelitian atas nama Marceilla Hidayat ini adalah Pantai Pangandaran Kabupaten Ciamis Jawa Barat, sedangkan lokasi penelitian penulis adalah di Kampung Sungai Rawa Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak.</p>

3.	<p>Pengembangan Destinasi Pariwisata Desa Wisata Di Desa Sungai Tohor Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti. Andrian Hidayat (2016)</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1. Lokasi penelitian atas nama Andrian Hidayat ini dilakukan di Desa Sungai Tohor Kepulauan Meranti, sedangkan penelitian penulis dilakukan di Kampung Sungai Rawa Kabupaten Siak. 2. Tahun penelitian Andrian Hidayat adalah tahun 2016, sedangkan penelitian penulis tahun 2018. 3. Perbedaan selanjutnya dilihat dari variabel, yakni Pengembangan Destinasi Pariwisata Desa Wisata, sedangkan variabel penulis adalah Upaya Pengembangan Ekowisata
----	--	--	--

			<p>4. Mangrove</p> <p>5. Konsep yang digunakan dalam penelitian Andrian Hidayat adalah Konsep Pengembangan Pariwisata menurut (Yoeti,2008:2-3), sedangkan penelitian penulis menggunakan konsep pengembangan pariwisata menurut Edward Inskeep (1998).</p>
--	--	--	--

C. Kerangka Pemikiran

Gambar II.2 Kerangka Pikir Tentang Upaya Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Ekowisata Mangrove



Sumber: Olahan Penulis Tahun 2018

D. Konsep Operasional

Variabel utama dalam penelitian ini adalah tentang “upaya pemerintah desa dalam pengembangan ekowisata mangrove di Kampung Sungai Rawa Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak”. Yang dimaksudkan dalam penelitian ini indikatornya terdiri dari:

1. Upaya adalah usaha atau kegiatan yang mengerahkan tenaga, pikiran untuk mencapai suatu tujuan.
2. Pemerintah desa adalah Penghulu Kampung Sungai Rawa dibantu oleh Perangkat sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Ekowisata adalah pariwisata yang berwawasan lingkungan
4. Pengembangan ekowisata mangrove adalah kegiatan atau upaya yang dilakukan terhadap fasilitas ekowisata mangrove dari variasi maupun jumlah guna memaksimalkan sumber daya alam yang ada menjadi lebih berdaya guna.
5. Pangsa Pasar adalah target pengunjung dari golongan/wilayah mana dari dikembangkannya ekowisata mangrove Sungai Rawa.
6. Tourist Attracton/Objek Wisata adalah tempat menarik di mana wisatawan berkunjung, biasanya karna nilai budaya atau alamnya yang melekat atau di pamerkan, sejarah, keindahan yang dibangun dan tempat hiburan.

7. Infrastruktur adalah prasarana, yaitu segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses. Seperti jalan dan ketersediaan informasi dan petunjuk arah.
8. Aksesibilitas adalah derajat kemudahan dicapai oleh orang terhadap suatu objek, pelayanan ataupun lingkungan.
9. Fasilitas dan Pelayanan Wisatawan adalah suatu sarana dan prasarana yang harus disediakan oleh pengelola yang dapat menciptakan rasa menyenangkan yang disertai dengan kemudahan dan pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam menikmati ekowisata mangrove.
10. Elemen Institusi/institusional adalah lembaga atau institusi yang dibentuk untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu dalam hal ini adalah pengelola ekowisata mangrove.
11. Desa wisata adalah komunitas atau masyarakat yang terdiri dari para penduduk suatu wilayah terbatas yang bisa saling berinteraksi secara langsung dibawah sebuah pengelolaan dan memiliki sebuah kepedulian serta kesadaran untuk berperan bersama sesuai keterampilan dan kemampuan masing-masing memberdayakan potensi secara kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan serta terwujudnya kesejahteraan masyarakat

E. Operasional Variabel

Tabel II.2 Operasional Variabel Upaya Pemerintahan Desa Dalam Pengembangan Ekowisata Mangrove Di Kampung Lalang Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak

Konsep	Variabel	Indikator Pengembangan	Sub Indikator
<p>Pengembangan</p> <p>Adalah suatu proses atau suatu cara menjadikan sesuatu menjadi maju, baik sempurna dan berguna.</p> <p>Poerwadarminta (2002:474).</p>	<p>Upaya Pengembangan</p>	1. Pangsa pasar	<p>a. Wisatawan asing</p> <p>b. Wisatawan nasional</p> <p>c. Wisatawan lokal.</p>
		2. Tourist Attraction	<p>a. Infrastruktur</p> <p>b. Keaslian dan</p> <p>c. Panorama Alam</p>
		3. Aksesibilitas	<p>a. Prasarana</p> <p>b. Ketersediaan Informasi</p>
		4. Fasilitas dan Pelayanan wisatawan	<p>a. Kelengkapan</p> <p>b. Kualitas SDM</p>
		5. Elemen Institusi (Institutional)	<p>a. Kerjasama</p> <p>b. Penerimaan Masyarakat</p>

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bertipe deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian ini berupaya menggambarkan objek atau subjek yang diteliti sesuai dengan apa adanya, serta menjelaskan tentang variabel yang diteliti, dalam hal ini adalah “Upaya Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Ekowisata Mangrove Di Kampung Sungai Rawa Kecamatan Sungai Apit”. Menurut Moleong (2005) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di lakukan di Kampung Sungai Rawa Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak, tepatnya di kantor Kepala Desa Kampung Sungai Rawa. Penulis melakukan penelitian di tempat ini karna ekowisata Mangrove mempunyai potensi perekonomian bagi Kampung Sungai Rawa serta mengetahui seberapa besar pemerintah desa dalam melihat potensi yang ada.

C. Informan dan Key Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. (Meleong 2000:

97) informan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti. Dalam penelitian ini terdapat 2 informan diantaranya:

1. Informan kunci, yaitu orang yang sangat memahami permasalahan yang diteliti yaitu Kerani kampung Sungai Rawa.

D. Informan, yaitu orang-orang yang dianggap mengetahui permasalahan yang diteliti. Adapun yang dimaksud sebagai informan dalam penelitian ini adalah Penghulu Kampung Sungai Rawa, Perangkat Kampung (Ketua Kelompok Pemerhati Hutan Mangrove, Kepala Urusan Keuangan, Juru Tulis II, Juru Tulis III) dan Masyarakat Pengunjung Mangrove Kampung Sungai Rawa.

E. Teknik Penarikan Informan

Penelitian ini menggunakan beberapa teknik penarikan informan. Untuk Key Informan yaitu Kerani Kampung Sungai Rawa menggunakan teknik *Snowball Sampling* begitu juga dengan informan tambahan yakni Ketua Kelompok Pemerhati Hutan Mangrove, Kepala Urusan Keuangan, Juru Tulis Pembangunan, Juru Tulis Kesejahteraan Sosial. *Snowball Sampling* yaitu teknik pengambilan responden sumber data yang pada awalnya jumlahnya sedikit tersebut belum mampu memberikan data yang lengkap, maka harus mencari orang lain yang dapat digunakan sebagai sumber data. (Sugiyono, 2012:96).

Sedangkan untuk masyarakat sekitar yang relatif banyak maka penulis menggunakan teknik *Purposive Sampling* yakni teknik untuk menentukan sampel penelitian dengan beberapa pertimbangan tertentu yang bertujuan agar data yang yang diperoleh nantinya bisa lebih representatif (Sugiyono:2010)

Dalam hal ini penulis menentukan informan dalam penelitian ini berdasarkan pertimbangan usia, yaitu remaja dan dewasa. Untuk itu penulis mengklasifikasikan usia remaja dengan dewasa adalah sebagai berikut:

Kategori umur menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia (2009)

1. Usia 17 sampai dengan usia 25 tahun dikategorikan sebagai remaja akhir
2. Usia 26 tahun sampai dengan usia 35 tahun dikategorikan sebagai dewasa awal
3. Usia 36 sampai dengan usia 45 tahun dikategorikan sebagai dewasa akhir

Adapun alasan penulis melihat dari pertimbangan usia dikarenakan, Pemahaman dan cara pandang yang berbeda antara remaja dan dewasa.

F. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari responden yang merupakan sumber utama dalam penelitian ini, yakni data yang diperoleh langsung dari observasi, wawancara, dan dokumentasi guna memperoleh jawaban.
2. Data Sekunder, yaitu data dan informasi pendukung berupa hasil penelitian yang relevan, dokumen dan arsip, laporan, catatan-catatan dari Kantor Penghulu Kampung Sungai Rawa atau bisa melalui informan yaitu masyarakat.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang di gunakan penulis dalam rangka mengumpulkan data penelitian, pengumpulan data dan informasi dalam penelitian ini menggunakan teknik-teknik :

1. Observasi

Suatu kegiatan yang dilakukan penulis untuk melakukan pengamatan secara langsung terhadap Pemerintah Desa dalam Mengembangkan Ekowisata Mangrove Dalam Meningkatkan Perekonomian Desa.

3. Wawancara

Teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab langsung kepada responden dan informan.

4. Dokumentasi

Adalah mengumpulkan data dengan cara mengambil data-data dari catatan atau dokumentasi yang di peroleh melalui dokumen-dokumen atau arsip-arsip dari Kantor Penghulu Kampung Sungai Rawa.

G. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data yang dipergunakan penulis dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif dengan pendekatan deskriptif yaitu berusaha memaparkan data yang ada dari berbagai sumber dan menghubungkan dengan fenomena-fenomena sosial serta menelusuri segala fakta yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas berdasarkan hasil penelitian. Selanjutnya dianalisis secara kualitas dengan uraian serta penjelasan yang mendukung. Setelah itu dari hasil analisis ditarik kesimpulan yang merupakan hasil akhir dari penelitian dengan judul Upaya Pemerintahan Desa Dalam Pengembangan Ekowisata Mangrove Di Kampung Sungai Rawa Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak.

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kampung Sungai Rawa

1. Sejarah Kampung

Pada masa penjajahan Belanda tahun 1940 Kampung Sungai Rawa yang disebut sekarang ini adalah sebelumnya Kampung Penyengat atau Sungai Penyengat yang pada saat itu dihuni oleh 2 suku yaitu Suku Melayu yang sampai sekarang masih ada sampai saat ini dan Suku Asli yang sekarang disebut Suku Akid. Setelah pertumbuhan penduduk semakin tahun semakin bertambah banyak, maka oleh kedua suku tadi membuat kata sepakat untuk mencari jalan terbaik guna menyelesaikan masalah supaya tidak terjadi masalah sosial seperti Agama atau Kepercayaan, dimana Suku Melayu menganut Agama Islam dan Suku Akid yang menganut Kepercayaan Animisme, dan pada saat itu Suku Melayu dipimpin oleh seorang yang bernama Mbondengan julukan Batin menandai masa kekalahan Jepang ditangan sekutu Indonesia memproklamasikannya Kampong Penyengat dibawah naungan Siakuntuk sementara administrasinya dilimpahkan ke Belitung di Pulau Padang. Setelah terbentuknya Kecamatan Sungai Apit maka seluruh administrasi Kampung Penyengat ang terdiri dari 2 suku tadi dimasukkan kedalam wilayah Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Bengkalis.

Menandai Orde Baru Kampung Sungai Penyengat yang lazim disebut dengan nama Penyengat terjadilah kampung muda yang sukar disebut pada pemekaran dimana kepala Kampung Anuar Abdullah. Pada masa Pemerintahan Kepala Kampug Anuar Abdullah masyarakat Kampung Sungai Rawa melaksanakan kegiatan seperti gotong rovog untuk membuat sarana prasarana tata

kampung, pada tahun 1998 Kampung Sungai Rawa terjadi paceklik banjir air setinggi 1 meter yang tergenang diseluruh kampung diakibatkan meluapnya air Sungai Rawa diberi nama oleh sebab sebuah sungai yang membelahi kampung menurut sesepuh orang-orang dahulu dipinggir sungai yang membelahi 2 Sungai Rawa tumbuh sebatang pohon kayu dengan nama pohon Kayu Rawa. Pada tahun 1999 terjadi pemekaran Kabupaten Bengkalis menjadi Kabupaten Siak dan Kampung Sungai Rawa masuk dalam wilayah Kabupaten Siak. Dengan pemekaran Kabupaten baru Kampung Sungai Rawa sudah mulai maju seperti infrastruktur (semenisasi jalan, bangunan, gedung sekolah permanen) dan pembangunan jembatan penyebrangan antar kampung, dan dibangunnya jalan Hotmik menuju jalan kawasan Industri Buton Kabupaten Siak, serta Kampung Sungai Rawa termasuk blok kawasan industri kabupaten siak dan bangunan lainnya. Jalan dan jembatan penyebrangan sudah bisa dilewati oleh masyarakat baik menuju Kecamatan maupun ke Kabupaten pada tahun 2009. Saat ini Penghulunya bernama Mulyadi dari tahun 2014-2020.

2. Demografi

Kampung Sungai Rawa terletak di dalam wilayah Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak Propinsi Riau yang berbatasan dengan:

- e. Sebelah Utara berbatasan dengan Mengkapan
- f. Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Panjang
- g. Sebelah Selatan berbatasan dengan Rawa mekar Jaya
- h. Sebelah Barat berbatasan dengan Dosan Kecamatan Pusako

Luas wilayah kampung Sungai Rawa adalah 241.743 Ha dimana geografi berupa daratan yang bertopografi datar, dan 150 Ha daratan dimanfaatkan sebagai lahan pertanian yang dimanfaatkan untuk penyesuaian iklim kampung Sungai Rawa, sebagaimana kampung-kampung di wilayah Indonesia kampung Sungai Rawa mempunyai iklim Kemarau dan Penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam pada lahan pertanian yang ada di kampung Sungai Rawa Kecamatan Sungai Apit.

3. Keadaan Sosial

Penduduk Kampung Sungai Rawa berasal dari berbagai daerah yang berbeda-beda, dimana mayoritas penduduknya yang paling dominan berasal dari Suku Melayu sehingga tradisi musyawarah untuk mufakat, gotong royong dan kearifan lokal yang lain sudah dilakukan oleh masyarakat sejak adanya Kampung Sungai Rawa dan hal tersebut secara efektif dapat menghindari adanya benturan-benturan antar kelompok masyarakat. Kampung Sungai Rawa mempunyai jumlah penduduk 1.055 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 560 jiwa, Perempuan 495 Orang dan 297 KK, yang terbagi dalam 2 wilayah dusun, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel IV.1 Jumlah Penduduk Kampung Sungai Rawa

Jenis Kelamin	Dusun I	Dusun II
Laki-laki	318 Orang	264 Orang
Perempuan	242 Orang	231 Orang
Total	560 Orang	495 Orang

Tabel IV.2 Tingkat Pendidikan Masyarakat Kampung Sungai Rawa

Jenis Kelamin	prasekolah	SD	SMP	SMA/MA	Sarjana
Laki-laki	134 Orang	42 Orang	42 Orang	70 Orang	11 Orang
Perempuan	122 Orang	53 Orang	58 Orang	80 Orang	19 Orang
Total	258 Orang	95 Orang	100 Orang	150 Orang	30 Orang

Karena kampung Sungai Rawa merupakan kampung pertanian maka sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, selengkapnya sebagai berikut:

Tabel IV.3 Pekerjaan Masyarakat Kampung Sungai Rawa Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak

Petani	Nelayan	Pedagang/ Swasta	Buruh	PNS	Pegawai Swasta
70 KK	51 KK	15 KK	141 KK	10 KK	10 KK

Kondisi sarana dan prasarana umum Kampung Sungai Rawa secara garis besar adalah sebagai berikut:

Tabel IV.4 Sarana Dan Prasarana Kampung Sungai Rawa

No	Sarana/prasarana	Jumlah/Volume	Keterangan
1.	Gedung pertemuan	1 Unit	Layak Pakai
2.	Kantor Kampung	1 Unit	Layak Pakai
3.	Puskesmas Pembantu	1 Unit	Layak Pakai
4.	Masjid	1 Unit	Layak Pakai
5.	Musholla	3 Unit	Layak Pakai

6.	PAUD	1 Unit	Layak Pakai
7.	TK umun/TK agama	2 Unit	Layak Pakai
8.	SD Negeri	1 Unit	Layak Pakai
9.	SMP Negeri/MTS swasta	1 Unit	Layak Pakai
10.	SMA/MA	1 Unit	Layak Pakai
11.	MDA	1 Unit	Layak Pakai
12.	Sungai	24.000 M	Layak Pakai
13.	Jalan Pemda	2.600 M	Layak Pakai
14.	Jalan Lingkungan	9000 M	Layak Pakai
15.	Lapangan Bola Kaki	1 Ha	Layak Pakai
16.	Lapangan Bola Volly	1 Unit	Layak Pakai
17.	Puskesmas/posyandu	1 Unit	Layak Pakai
18.	Dermaga	1 Unit	Layak Pakai
19.	Gedung PKK	1 Unit	Layak Pakai
20.	Tower	4 Unit	Layak Pakai
21.	Balai Kesenian	1 Unit	Layak Pakai
22.	Jembatan (Leghton)	1 Unit	Layak Pakai

Sumber: Peraturan Desa Kampung Sungai Rawa Tahun 2017

Sarana dan prasarana yang ada di Ekowisata Mangrove Kampung Sungai Rawa dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel IV.5 Rincian Sarana dan Prasarana Ekowisata Mangrove Kampung Sungai Rawa

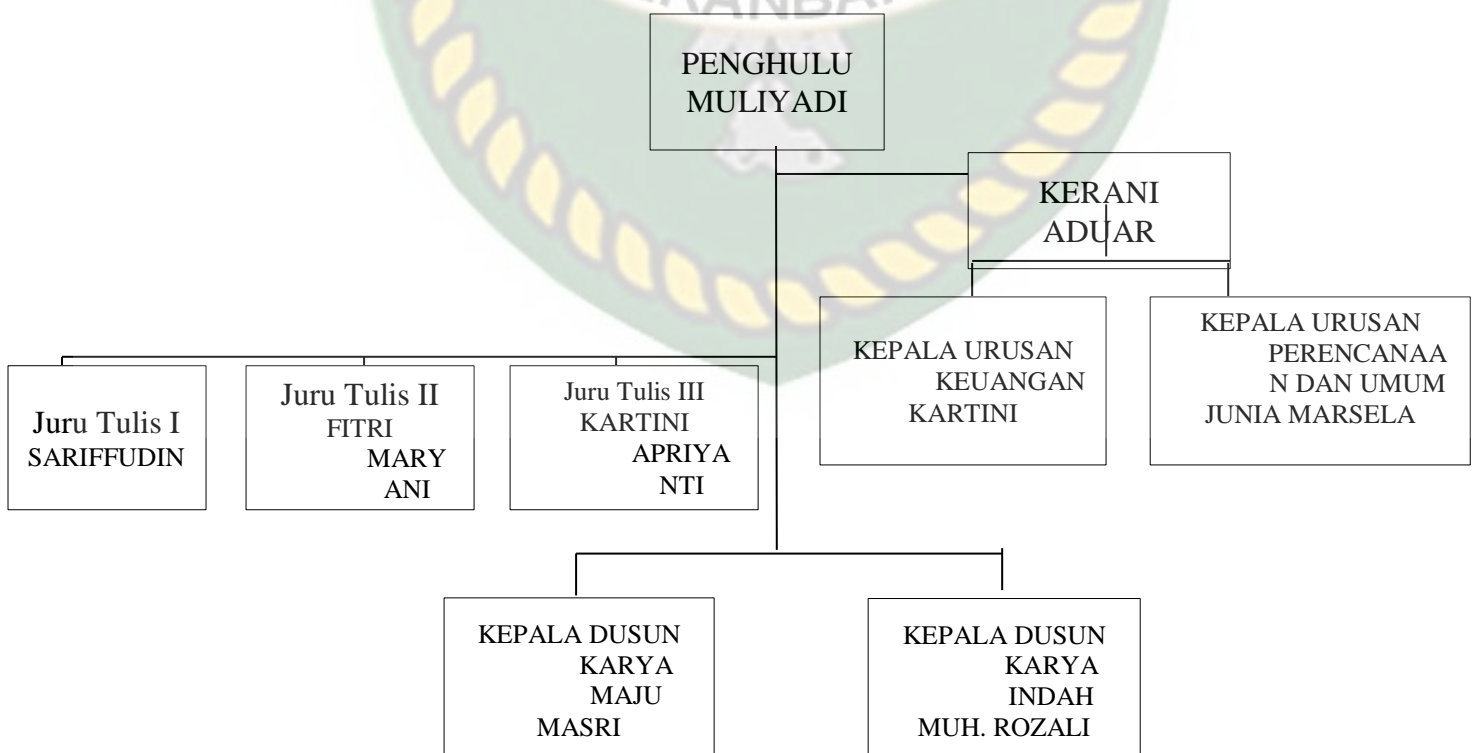
No	Sarana dan Prasarana	Jumlah	Keterangan
1.	Toilet	4 unit	2 unit belum difungsikan
2.	Kantin	2 unit, hari-hari besar bertambah	Hanya menjual makanan ringan dan minuman
3.	Gazebo	2 unit	Layak pakai
4.	Menara Pantau	1 unit	Layak pakai
5.	Kursi	2 unit	Layak pakai
6.	Lahan Parkir	50 Meter	Seadanya
7.	Tempat pemancingan	-	Peralatan/informasi tidak lengkap

Sumber: Hasil Observasi Penelitian Tahun 2018

B. Struktur Organisasi Pemerintahan Kampung Sungai Rawa

Struktur organisasi Kampung Sungai Rawa Kecamatan Sungai Apit menganut sistem Kelembagaan Pemerintahan Kampung dengan pola minimal, selengkapnya disajikan dalam gambar sebagai berikut:

Gambar IV.1 Susunan Tata Kerja Pemerintahan Kampung Sungai Rawa Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak Pada Peraturan Bupati Siak Nomor 93 Tahun 2016



Dari gambar IV.1 Bagan Struktur Organisasi Pemerintahan Kampung diatas, Penghulu merupakan orang pertama di kampung yang memikul beban dan bertanggung jawab terhadap kampung di dalam mengelola keuangan kampung dan dibantu oleh perangkat kampung lainnya agar roda pemerintahan kampung tetap berjalan lancar.

Adapun Aparatur Pemerintahan Kampung Sungai Rawa Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak adalah sebagai berikut:

1. Penghulu : 1 Orang
2. Kerani : 1 Orang
3. Perangkat Kampung : 9 Orang
4. Kepala Dusun : 2 Orang
5. Badan Permusyawaratan Kampung : 7 Orang
6. Lembaga Kemasyarakatan
 - 1) LPMK : 11 Orang
 - 2) PKK : 29 Orang
 - 3) Karang Taruna : 15 Orang
 - 4) Linmas : 4 Orang
 - 5) Kelompok Pemerhati Mangrove : 25 Orang

C. Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi Pemerintahan Kampung Sungai Rawa Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak.

Penghulu mempunyai tugas dan wewenang dari masing-masing jabatan pada Struktur Organisasi di atas diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor

93 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Kampung.

1. Penghulu

Penghulu berkedudukan sebagai pimpinan penyelenggaraan pemerintahan kampung. Bertugas menyelenggarakan pemerintahan kampung, melaksanakan pembangunan kampung, melaksanakan pembinaan kemasyarakatan kampung, dan melaksanakan pemberdayaan masyarakat kampung. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud penghulu juga mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan kampung
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa
- c. Memegang kekuasaan pengelola keuangan dan aset
- d. Menetapkan peraturan desa
- e. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa
- f. Membina kehidupan masyarakat kampung
- g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat kampung
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian kampung
- i. Mengembangkan sumber pendapatan kampung
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat kampung
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat kampung
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna
- m. Mengkoordinasikan pembangunan kampung secara partisipatif

- n. Mewakili kampung didalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana yang dimaksud diatas, penghulu juga mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indoneisa dan Bhineka Tunggal Ika
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat kampung
- c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat kampung
- d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan
- e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender
- f. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan kmapung yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih serta bebas kolusi, korupsi dan nepotisme.
- g. Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di kampung
- h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan kampung yang baik
- i. Mengelola keuangan dan aset kampung

- j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kampung
- k. Menyelesaikan perselisihan kampung
- l. Mengembangkan perekonomian masyarakat kampung
- m. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat kampung
- n. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di kampung
- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup
- p. Memberikan informasi kepada masyarakat kampung

2. Kerani

Kerani mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Mengoordinasikan penyusunan kebijakan dan progrsm kerja pemerintahan kampung
- b. Pengoordinasian pelaksana teknis dan pelaksana kewilayahan
- c. Mengoordinasikan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan kampung
- d. Menyelenggarakan kesekretariatan kampung
- e. Menjalankan administrasi kampung
- f. Memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi pemerintahan kampung

- g. Melaksanakan urusan rumah tangga, dan perawatan sarana dan prasarana fisik pemerintahan kampung
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan oleh penghulu

Dalam melaksanakan tugas, Kerani mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan penyusunan program kerja, evaluasi dan pelaporan kegiatan pemerintahan kampung
- b. Pelaksanaan kegiatan kesekretariatan kampung
- c. Pelaksanaan urusan personalia perangkat kampung
- d. Pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga kampung
- e. Pelaksanaan pelaporan keuangan kampung
- f. Pelaksanaan pelayanan administrasi pemerintahan kampung
- g. Pengelola perpustakaan kampung
- h. Pengelola aset desa, dan
- i. Penyusunan rancangan peraturan desa, peraturan penghulu dan keputusan penghulu

3. Kepala Urusan

Kepala urusan umum membantu penghulu dibidang urusan umum, yang mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Melakukan urusan surat menyurat
- b. Melaksanakan pengelola arsip pemerinthan kampung
- c. Melaksanakan pengelola barang investasi kampung
- d. Mempersiapkan sarana rapat/pertemuan, upacara resmi dan lain-lain kegiatan pemerintahan kampung

- e. Melaksanakan pengelola perpustakaan kampung
- f. Melakukan tugas-tugas kedinasan diluar urusan umum dan perencanaan yang diberikan oleh penghulu atau kerani

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, urusan umum mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan urusan tata usaha dan kearsipan pemerintah kampung
- b. Pelaksanaan urusan barang inventaris kampung
- c. Pelaksaaan urusan rumah tangga kampung
- d. Pelaksanaan pelayanan administrasi kepada masyarakat kampung
- e. Penyusunan rancangan peraturan kampung , peraturan penghulu dan keputusan penghulu
- f. Penyiapan rapat
- g. Perjalanan dinas
- h. Pelayanan umum

4. Kepala Dusun

Kepala Dusun mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Membantu penghulu dalam melaksanakan tugas dan kegiatan penghulu
- b. Melaksanakan kegiatan dibidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, kebudayaan, ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat
- c. Melaksanakan peraturan kampung, peraturan penghulu, dan keputusan penghulu

- d. Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada penghulu

Dalam melaksanakan tugasnya, kepala dusun mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan
- b. Pelaksanaan peraturan kampung, peraturan penghulu dan keputusan penghulu
- c. Pelaksanaan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat
- d. Peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat
- e. Peningkatan partisipasi dan gotong royong masyarakat dalam pembangunan kampung
- f. Pelaksanaan keamanan, ketertiban dan perlindungan masyarakat
- g. Pelaksanaan pengembangan dan pembinaan kebudayaan
- h. Pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas kepala dusun

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Reponden

Adapun identitas responden yang penulis paparkan dalam penelitian ini adalah berdasarkan jenis kelamin, tingkat pendidikan responden dan umur responden.

1. Jenis Kelamin

Berdasarkan hasil penelitian identitas menurut jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel V.1 Klasifikasi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah (Orang)
1.	Laki-laki	3
2.	Perempuan	4
	Jumlah	7

Sumber: Data Olahan Penelitian Tahun 2018

2. Tingkat Pendidikan

Data responden berdasarkan jenjang pendidikan terakhir dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel V.2 Klasifikasi Responden Berdasarkan Jenjang Pendidikan Terakhir

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)
1.	SD	0
2.	SLTP	2
3.	SLTA	4
4.	Lainnya	1

Jumlah	7
---------------	----------

Sumber: Hasil Olahan Data Tahun 2018

3. Kelompok Umur Responden⁶⁹

Berdasarkan hasil penelitian identitas responden berdasarkan latar belakang usia dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel V.3 Klasifikasi Responden Berdasarkan Latar Belakang Usia

No	Umur	Jumlah (Orang)
1.	17 - 25 Tahun	2
2.	26 - 35 Tahun	2
3.	36 - 45 Tahun	3
Jumlah		7

Sumber: Hasil Olahan Data Tahun 2018

4. Nama dan Identitas Responden

Tabel V.4 Nama dan Identitas Responden

No	Nama	Umur	Pendidikan Terakhir	Pekerjaan/Jabatan	Jenis Kelamin
1.	Aduar	44 Tahun	SLTA	Kerani	Laki-laki
2.	Kartini	34 Tahun	PTT 1	Kepala Urusan Keuangan	Perempuan
3.	Fitri Maryati	24 Tahun	SLTA	Juru Tulis Pembangunan	Perempuan
4.	Kartini A	38 Tahun	SLTA	Juru Tulis Kesra	Perempuan

5.	Junaidi	48 Tahun	SLTP	Ketua Kelompok Pemerhati Mangrove	Laki-laki
6.	Muhar Juan	44 Tahun	SLTA	PNS	Laki-laki
7.	Asriana	21 Tahun	SLTP	Pelajar	Perempuan

B. Tanggapan Responden Terhadap Upaya Pemerintahan Kampung Dalam Pengembangan Ekowisata Mangrove Di Kampung Sungai Rawa Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak

Dalam bagian ini penulis akan menjelaskan analisis jawaban responden yang berasal dari Penghulu, Kerani, Kepala Urusan Keuangan, Juru Tulis Pemabangunan, Juru Tulis Kesejahteraan Sosial, dan masyarakat pengunjung ekowisata mangrove. Dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Pangsa pasar
2. Tourist Attraction
3. Aksesibilitas
4. Fasilitas dan Pelayanan wisatawan
5. Elemen Institusi (Institutional)

Dalam penelitian ini dilakukan pembahasan satu persatu dari setiap penilaian yang telah diberikan responden terhadap pertimbangan yang telah di sajikan agar data yang dihasilkan dapat secara mudah dipahami.

1. Pangsa Pasar

Pangsa Pasar/ *market share* yaitu sebuah strategi yang mencakup sasaran pasar yang luas menjadi kumpulan dari beberapa bagian kecil diantaranya konsumen, bisnis

ataupun negara yang mempunyai kebutuhan dan kepentingan dan memiliki prioritas dan kemudian merancang sebuah strategi untuk menjadikannya sasaran sesuai dengan *market segment*. (Phillip Kolter dan Gary Amstrong, 2004:81)

Hasil wawancara pada tanggal 06 Desember 2018 jam 10.15-11.40 tentang siapa saja atau orang dari mana saja yang pernah berkunjung di Ekowisata Mangrove Sungai Rawa peneliti melakukan wawancara dengan Kerani Sungai Rawa beliau mengatakan:

“yang saya pernah ketahui orang-orang yang pernah datang berkunjung di Ekowisata Mangrove ini adalah orang-orang dari Bengkalis, Pekanbaru, Mahasiswa dari UNRI, UIR, STIKES dan ada juga orang-orang dari luar Negeri seperti dari Negara Hongaria dan UNESCO. Kemudian juga dari masyarakat-masyarakat kita sendiri, Kecamatan Sungai Apit dan Siak. Dan kita berharap kita bisa menarik minat pengunjung asing lainnya juga untuk berkunjung di ekowisata mangrove ini”.

Sedangkan hasil wawancara pada tanggal 06 Desember 2018 jam 11.45-12.15 dengan Juru Tulis II dan Juru Tulis III, beliau mengatakan:

“ yang berkunjung di ekowisata mangrove Sungai Rawa ini, yakni Dosen-dosen dari perguruan tinggi IPB, UNRI, UIN mereka datang untuk menanam bakau, kemudian dari UNESCO menjalankan program pengembangan hidup seperti penyemaian bibit Kopi dan Pinang, dan Pelatihan MPA (Masyarakat Peduli Asap)”.

Selain itu menurut hasil wawancara pada tanggal 06 Desember 2018 jam 13.09-14.00 dengan Bapak Junaidi sebagai Ketua Kelompok Pemerhati Mangrove Kampung Sungai Rawa yang juga sebagai Key Informan pada penelitian ini, mengatakan:

“ yang pernah berkunjung di ekowisata mangrove Sungai Rawa antara lain mahasiswa dari perguruan tinggi IPB, UNRI dan UIN, UNESCO yang terdiri dari Negara Singapore, Malaysia, Thailand, kemudian pengunjung dari daerah seperti dari kecamatan Sungai Apit dan Siak”.

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa yang pernah berkunjung di ekowisata mangrove Sungai Rawa adalah wisatawan asing seperti Hongoria dan anggota UNESCO, wisatawan lokal yakni penduduk Kampung Sungai Rawa sendiri dan masyarakat Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak, kemudian wisatawan Nasional seperti pengunjung di luar Kabupaten Siak.

Berdasarkan hasil Observasi penulis pada tanggal 08 Desember 2018 jam 15.00 adapun pengunjung yang datang pada tanggal tersebut adalah pengunjung dari Siak, Pekanbaru dan Sungai Apit.

2. *Tourist Attraction* (Daya Tarik Wisata)

Touris attraction/daya tarik wisata adalah tempat yang menarik di mana wisatawan berkunjung, biasanya karena nilai alam atau budaya yang dipamerkan, signifikansi historis, keindahan alami atau buatan, yang menawarkan waktu luang dan hiburan. Untuk mengunjungi tempat wisata selain nilai-nilai diatas yang menjadi pertimbangan lain yakni terkait infrastruktur dan prasarana yang dimiliki oleh tempat wisata tersebut. (Yoeti:1985)

Menurut Ian Jacobs, (1999) Infrastruktur merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan sekumpulan fasilitas yang sengaja dibuat untuk mendukung aktivitas kehidupan manusia. Infrastruktur biasanya sengaja dibangun untuk bisa membantu dan mempermudah suatu kegiatan tertentu seperti transportasi, pendataan penduduk, dan berbagai macam kegiatan lainnya.

Jenis-jenis Infrastruktur

1) Infrastruktur Keras (Physical Hard Infrastructure)

Infrastruktur keras merupakan infrastruktur yang memiliki bentuk fisik yang nyata dan kegunaannya memang berasal dari bentuk fisik yang dimilikinya tersebut. Infrastruktur keras merupakan infrastruktur yang paling banyak berkaitan dengan kepentingan umum masyarakat. Kebanyakan masyarakat juga mengartikan kata infrastruktur sebagai infrastruktur keras. Beberapa contoh infrastruktur keras yaitu bandara, kereta api, pelabuhan, dermaga, saluran irigasi, got, bendungan, jalan raya, dan lain – lain.

2) Infrastruktur Keras Non – Fisik (Non – Physical Hard Infrastructure)

Infrastruktur keras non fisik merupakan infrastruktur keras yang tidak memiliki bentuk fisik yang nyata/jelas akan tetapi berguna dan mendukung keberadaan infrastruktur keras lainnya. Infrastruktur keras non fisik sangat berkaitan erat dengan permasalahan kepuasan publik. Infrastruktur keras non fisik biasanya hanya bisa dirasakan kegunaannya ketika digabungkan ataupun digunakan bersama-sama dengan infrastruktur lainnya seperti infrastruktur keras ataupun infrastruktur lunak. Beberapa contoh infrastruktur keras non fisik yaitu pasokan listrik, ketersediaan air bersih, jaringan pipa penyalur, jaringan komunikasi seperti internet dan telepon, ketersediaan saluran gas, pasokan energi, dan lain – lain.

3) Infrastruktur Lunak (Soft Infrastructure)

Pengertian infrastruktur lunak adalah infrastruktur yang berbentuk kelembagaan ataupun kerangka institusional. Infrastruktur lunak pada

dasarnya harus dibangun dengan memperhatikan berbagai macam nilai dan norma seperti nilai budaya, norma agama, norma asusila, norma hukum dan berbagai nilai dan norma lainnya. Infrastruktur lunak biasanya berkaitan erat dengan aktivitas pelayanan masyarakat yang disediakan oleh pemerintah. Beberapa contoh infrastruktur lunak yaitu pelayanan kantor pos, pelayanan polisi, pelayanan pembuatan surat ijin mengemudi, pelayanan kantor kecamatan/kelurahan, dan berbagai infrastruktur lunak lainnya.

Untuk dapat tercapainya keberhasilan target dari pengembangan ekowisata mangrove Sungai Rawa, infrastruktur juga menjadi hal yang paling penting untuk diperhatikan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kerani Kampung Sungai Rawa tentang infrastruktur yang ada seperti Jalan pada , Keaslian dan Kebersihan pada tanggal 06 Desember 2018 jam 10.15-11.40 . Beliau mengatakan:

“yang menjadi penghalang besar bagi pengunjung yaitu keadaan jalan sekitaran industri Buton yang rusak parah yang membuat pengunjung luar berrpikir ulang untuk datang ke Sungai Rawa, dan masih ada jalan menuju mangrove sekitar 50 meter yang belum di aspal. Kemudian belum adanya tempat sampah disekitar mangrove, yang bertugas menjaga kebersihan mangrove adalah kelompok dari pemerhati mangrove yang telah dibagi tugasnya. Kemudian kalau tentang keaslian mangrove nya, mangrove ini memang sudah ada dari Datuk Moyang dahulu hanya saja ada beberapa dilakukan penanaman ulang oleh kelompok masyarakat dan dibantu oleh teman-teman Mahasiswa. Selanjutnya untuk panorama alamnya selain hutan mangrove nya disini pengunjung juga bisa melihat Laut dan Hulu Sungai”.

Kemudian wawancara dilanjutkan dengan Juru Tulis II dan Juru Tulis III pada tanggal 06 Desember 2018 jam 11.45-12.15. beliau mengatakan:

“ Kondisi jalan belum sepenuhnya memadai seperti jalan Buton, padahal itu adalah jalan utama bagi pengunjung untuk menuju ke Sungai Rawa. Untuk menjaga keaslian mangrove masyarakat dilarang menebang atau merusak ekosistem yang ada, untuk keindahan panorama lainnya yaitu pesisir pantai yang bisa dilihat dari menara pantau”.

Selanjutnya hasil wawancara dari Kepala Urusan Keuangan pada tanggal 06 Desember 2018 jam 12.15-13.00, beliau mengatakan:

“ Kondisi jalan belum bagus, dan untuk menjaga kebersihan harusnya kita tidak membuang sampah sembarangan, hanya saja tempat sampah belum tersedia tetapi disediakan tempat khusus membuang sampah yang kemudian sampah-sampah tersebut dibakar. Kemudian untuk menjaga keaslian lingkungan kita melarang siapa saja untuk tidak menebang pohon mangrove tetapi kita mengajak masyarakat untuk melestarikan mangrove yang sudah ada. Pengunjung juga bisa menikmati pemandangan laut dan sungai”.

Selanjutnya Selain itu menurut hasil wawancara pada tanggal 06 Desember 2018 jam 13.09-14.00 dengan Ketua Kelompok Pemerhati Mangrove Kampung Sungai Rawa, mengatakan:

”untuk menjaga keaslian mangrove dengan tidak merusak ekosistem yang ada, karna pada dasarnya orang kita ini adalah perusak, bagi yang ketahuan dengan sengaja merusak mangrove kita akan menegur dan di panggil ke Kantor Desa untuk dimintai keterangan, yang sampai sekarang yang belum kita atasi yaitu limbah dari industri yang mengakibatkan pencemaran kemudian untuk menjaga keasliannya kita berusaha mempertahankan atau memperkenalkan nama-nama mangrove dengan sebutan nama sesuai dengan daerah kita. Selain melihat mangrove pengunjung juga bisa melihat hutan, laut dan hulu sungai dari menara pantau”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa Infrastruktur seperti Jalan menuju ekowisata Mangrove belum sepenuhnya baik, hal ini dapat terlihat dari jalan industri Buton yang menjadi jalan utama menuju ekowisata mangrove Sungai Rawa rusak parah. Untuk

menjaga Keaslian dari mangrove sendiri yakni dengan melarang masyarakat untuk merusak atau menebang mangrove.

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan pada tanggal 08 Desember 2018 jam 15.00 jalan yang rusak kurang lebih 3 Km. Untuk kebersihan sendiri masih terdapat kayu-kayu yang tergolek di pantai akibat terbawa arus laut, serta sampah bekas makanan dan minuman yang berserakan di pantai karena tidak adanya tempat sampah disekitaran ekowisata mangrove Kampung Sungai Rawa. Selain mangrovenya ekowisata mangrove Sungai Rawa juga dapat menikmati pemandangan lau dan hulu sungai secara bersamaan dari rumah pantau yang telah disediakan oleh pihak pengelola ekowisata mangrove Kampung Sungai Rawa.

Berdasarkan jenis-jenis infrastruktur menurut Jacobs di atas maka infrastruktur yang ada atau diperlukan di ekowisata mangrove Kampung Sungai Rawa termasuk Infrastruktur Keras (Physical Hard Infrastructure)

3. Aksesabilitas

Aksesibilitas adalah derajat yang di capai oleh [orang](#), terhadap suatu objek, pelayanan ataupun [lingkungan](#). Kemudahan akses tersebut diimplementasikan pada bangunan gedung, lingkungan dan [fasilitas](#) umum lainnya.

Aktivitas kepariwisataan banyak tergantung pada transportasi dan komunikasi karena faktor jarak dan waktu yang sangat mempengaruhi keinginan seseorang untuk melakukan perjalanan wisata. Unsur yang terpenting dalam aksesibilitas adalah transportasi, maksudnya yaitu frekuensi penggunaannya, kecepatan yang dimilikinya dapat mengakibatkan jarak seolah-olah menjadi dekat.

Selain transportasi yang berkaitan dengan aksesibilitas adalah prasarana seperti penunjuk arah, papan informasi, *tour guide* dan lain-lain. Prasarana ini berfungsi untuk menghubungkan suatu tempat dengan tempat yang lain. Bambang Susantono, (2004:24)

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 06 Desember 2018 jam 10.15-11.40 dengan Kerani Kampung Sungai Rawa, mengenai Aksesibilitas seperti prasarana dan ketersediaan informasi, mengatakan bahwa:

“Salah satu kemudahan yang kita berikan kepada pengunjung adalah petunjuk arah di persimpangan menuju ekowisata mangrove, kemudian papan informasi mengenai flora dan fauna yang di miliki, disetiap pohon juga kita sediakan nama-nama mangrove sebagai edukasi, untuk wisatawan asing ataupun yang membutuhkan kita mempunyai *tour guide*.”

Kemudian penulis juga melakukan wawancara dengan Kepala Urusan Keuangan pada tanggal 06 Desember 2018 jam 12.15-13.00, beliau mengatakan:

“Kita mempromosikan atau memberikan informasi tentang ekowisata mangrove Kampung Sungai Rawa melalui media sosial seperti Facebook dan Instagram, kita juga menyediakan peta menuju ekowisata mangrove Sungai Rawa di media sosial tersebut”

Selain itu penulis juga melakukan wawancara pada tanggal 06 Desember 2018 jam 13.09-14.00 dengan Ketua Kelompok Pemerhati Mangrove Kampung Sungai Rawa, beliau mengatakan:

“kita sudah menyediakan petunjuk arah dari berbagai pintu masuk, kita mempunyai tiga pintu masuk yaitu jalur untuk motor dan mobil, dan bus. Kita juga memberikan kemudahan bagi mahasiswa atau siapa saja yang mau belajar tentang alam khususnya mangrove, kita bersedia mendampingi dan memberikan keterangan bagi mereka yang memerlukan, karna sesungguhnya wisata itu bukan hanya untuk hiburan tetapi juga untuk pengetahuan atau edukasi, bagi yang membutuhkan *tour guide* saya dan ipar saya yang bertugas menjadi *tour guide*, hanya saja kita belum punya tempat penginapan yang sah tapi jika pengunjung yang bermalam biasanya mereka tinggal dirumah saya untuk sementara ini rumah saya lah yang menjadi tempat singgah bagi mereka yang bermalam. Hanya saja

yang menjadi hambatan untuk kita sekarang ini yang belum dapat kita selesaikan yaitu masalah jalan industri Buton yang rusak dan limbah industri serta dana”.

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa prasarana penunjang belum sepenuhnya memadai seperti tidak adanya rumah singgah, dan kurangnya papan larangan dan selogan-selogan sebagai pemanis.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan pada tanggal 08 Desember 2018 jam 15.00 mengenai aksesibilitas adalah petunjuk arah dan papan informasi mengenai flora dan fauna yang ada di ekowisata mangrove Sungai Rawa sudah ada hanya saja masih kurang slogan-slogan lain sebagai daya tarik.

4. Fasilitas dan Pelayanan Wisatawan

Fasilitas merupakan salah satu faktor wisatawan dalam mengunjungi suatu daya tarik wisata. wisatawan akan datang dan berkunjung kembali apabila tersedianya fasilitas-fasilitas yang dapat memenuhi segala kebutuhannya selama menikmati daya tarik wisata tersebut. Dengan adanya fasilitas-fasilitas tersebut juga diharapkan dapat membuat wisatawan merasa lebih nyaman dan tinggal lebih lama serta memberikan kesan yang baik terhadap daya tarik wisata yang dikunjunginya. Kebutuhan wisatawan tidak hanya menikmati keindahan alam melainkan memerlukan sarana dan prasarana wisata seperti akomodasi sarana kebersihan, kesehatan, keamanan, komunikasi, tempat hiburan, hotel, restoran dan toko cendra mata. Sunaryo (2013:138).

Untuk mendukung hal tersebut maka dalam menyediakan fasilitas juga perlu adanya pelayanan yang dapat memberikan kemudahan dan kenyamanan kepada wisatawan.

Bentuk fasilitas layanan di dalam suatu destinasi antara lain tersedianya lahan parkir, kantin, tempat ibadah, toilet serta wahana bermain. Selain itu kualitas SDM pengelola juga dipandang penting dalam pengembangan ekowisata mangrove Kampung Sungai Rawa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kerani Kampung Sungai Rawa pada 06 Desember 2018 jam 10.15-11.40, mengatakan:

“sarana pelengkap yang ada di ekowisata mangrove Kampung Sungai Rawa ini yaitu balai pertemuan 2 buah, menara pantau, toilet 4 buah, jembatan untuk memancing. Kalau untuk kantin yang aktif itu ada 1 yang lain biasanya pada hari sabtu dan minggu ada beberapa yang ikut berjualan, untuk parkir belum ada. Yang mungkin perlu ditambah adalah wahana bermain air, gazebo dan Mushola. Kalau untuk SDM pengelola sudah lumayan baik hanya saja perlu adanya peningkatan”.

Selain itu, penulis juga melakukan wawancara dengan Juru Tulis II dan Juru Tulis III pada tanggal 06 Desember 2018 jam 11.45-12.15. Beliau mengatakan:

“Fasilitas di ekowisata mangrove belum memadai masih banyak yang kurang, mungkin perlu ditambah dengan adanya Mushola, wahana bermain dan spot foto yang menarik untuk menarik minat wisatawan. Untuk SDM pengelola ekowisata mangrove nya ketua nya sudah oke tetapi anggotanya masih perlu bimbingan dan pelatihan”.

Kemudian penulis juga melakukan wawancara dengan Kepala Urusan Keuangan pada tanggal 06 Desember 2018 jam 12.15-13.00, beliau mengatakan:

“kalau untuk sekarang ini tempat ibadah belum ada, parkir itu masih seadanya, toilet ada tapi belum sepenuhnya difungsikan. Untuk pengelola sendiri masih perlu pelatihan ekowisata mangrove masih banyak yang harus ditambah seperti pertunjukan Seni, Kios-kios untuk masarakat berjualan, menjual makanan khas dan rumah singgah”.

Kemudian untuk menguatkan hasil wawancara, penulis melakukan wawancara dengan key informan yakni dengan Ketua Kelompok Pemerhati

Mangrove Kampung Sungai Rawa pada tanggal 06 Desember 2018 jam 13.09-14.00, mengatakan bahwa:

“karena wisata ini untuk jangka panjang jadi memang perlu perhatian yang tinggi terkait fasilitas penunjang, insyaallah nanti akan di buat wahana bermain air tetapi juga harus memperhatikan keselamatan pengunjung, mungkin lebih kepada pemanfaatan pompong untuk mengelilingi laut untuk membangun ekonomi masyarakat, mendukung bagi masyarakat yang ingin berjualan karna kantin disitu hanya 2 dan itupun jarang buka, kemudian nantinya akan di buat kapal pemantau untuk memantau mangrovenya, dan memungkinkan juga nanti dibuat pentas seni budaya pada setiap weekend untuk menarik minat pengunjung. Kita juga sudah menyediakan gazebo ang bisa digunakan untuk rumah belajar”.

Dari wawancara tersebut, dapat di simpulkan bahwa kelengkapan yang ada di ekowisata mangrove Sungai Rawa masih minim dan masih banyak yang harus dibangun terutama yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan pada tanggal 08 Desember 2018 jam 15.00 mengenai Fasilitas dan pelayanan, yakni masih kurangnya tempat duduk, toilet yang berfungsi hanya 2 unit sedangkan 2 unit lainnya dikunci, dan sering kehabisan air karena tidak adanya petugas yang berjaga. Di setiap gazebo terpasang *Socket* tetapi tidak bisa difungsikan. Serta pegangan dijembatan yang sudah mulai rusak belum diperbaiki.

5. Elemen Institusi (Institutional)

Elemen Institusi adalah Sebuah kelompok, organisasi atau lembaga yang bekerjasama untuk melakukan upaya pengembangan ekowisata mangrove.

Peran dari lembaga ini sangat penting dalam mencapai kesuksesan pengembangan ekowisata mangrove Sungai Rawa terutama dari para pihak pengelola, tapi hal tersebut bukan lah pekerjaan yang mudah untuk itu diperlukan

kerjasama dengan pihak-pihak lain dan dari masyarakat Kampung Sungai Rawa itu sendiri.

Penulis melakukan wawancara dengan Kerani Kampung Sungai Rawa pada tanggal 06 Desember 2018 jam 10.15-11.40 tentang kerjasama dengan pihak lain dan penerimaan masyarakat terhadap dikembangkannya ekowisata mangrove Kampung Sungai Rawa, beliau mengatakan:

“kalau melakukan kerjasama belum ada, tapi kami dibantu oleh yayasan dari Pekanbaru yakni Yayasan Mitra Insani (YMI) yang membantu mencari donatur, selain bantuan dari yayasan sumber dana juga berasal dari Bapenas. Penerimaan dari masyarakat sejauh ini positif dan sangat mendukung. Program pengembangan ekowisata mangrove untuk sementara ini belum ada tapi Insyaallah pada tahun 2019 ini akan kita ajukan ke Penghulu karena bentuknya sudah ada dan sangat bermanfaat bagi kita, jika sudah ada SPJnya bisa tapi disini masih bingung takut salah menggunakan anggaran maka dari itu belum bisa dibuat”

Kemudian penulis melakukan wawancara dengan dengan Juru Tulis II dan Juru Tulis III pada tanggal 06 Desember 2018 jam 11.45-12.15, mengatakan bahwa:

“ kerjasama dengan desa atau pemerintah Daerah belum ada, tetapi selama ini kami dibantu oleh organisasi dari luar negeri dan sumbangan dari yayasan, penerimaan dari masyarakat positif dan sekarang orang luar sudah mulai kenal dengan Kampung Sungai Rawa”

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Kepala Urusan Keuangan pada tanggal 06 Desember 2018 jam 12.15-13.00, mengatakan bahwa:

“kalau kerjasama mungkin dari pihak ketiga, penerimaan masyarakat sendiri mereka senang, bangga, dan menikmati tetapi swadaya dari masyarakat masih kurang kebanyakan mereka hanya menikmati. Program pengembangan ekowisata ini masih belum di muat di dalam Perdes karena belum ada aturan yang jelas

mengenai ini, sebenarnya aturannya jelas tetapi Desa belum bisa memasukkan kegiatan mangrove ini ke dalam APBDes karena masih banyak kegiatan yang harus diutamakan”

Untuk memperkuat hasil penelitian, penulis juga melakukan wawancara dengan Ketua Kelompok Pemerhati Mangrove Kampung Sungai Rawa pada tanggal 06 Desember 2018 jam 13.09-14.00, beliau mengatakan:

”kami tidak menyebutkan kerjasama tapi kami meminta bantuan kepada Instansi-instansi Pemerintah pusat untuk program penanaman bakau yakni program dari ICCTF yang bekerjasama dengan Bapenas dan Badan Lingkungan Hidup (BLH). Selain itu kita juga meminta bantuan kepada Universitas-universitas yang pernah berkunjung secara sukarela. Penerimaan dari masyarakat sangat senang karena sedikit banyaknya kita dapat menerima hasil, karna apabila kampung kita jika tidak pernah dikunjungi orang luar kita tidak akan pernah berkembang, ekonomi akan tidak bisa meningkat karna adanya keluar masuk orang luar sehingga ekonomi kita bisa meningkat”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa selama ini Kampung belum melakukan kerjasama dengan desa lain, Pemerintah Daerah maupun dari pihak ketiga. Tetapi kampung mendapatkan bantuan dari Yayasan YMI, Bapenas dan BLH. Penerimaan dari masyarakat pun sangat positif hanya saja swadaya dari masyarakat nya masih kurang.

Selain dengan Pemerintahan Kampung Sungai Rawa, penulis ingin melihat sudut pandang dari masyarakat, maka penulis melakukan wawancara kepada beberapa pengunjung ekowisata mangrove Kampung Sungai Rawa untuk memperkuat hasil penelitian mengenai indikator yang ingin dicapai, berdasarkan klasifikasi umur, yakni pengunjung remaja dan dewasa.

1. Pangsa Pasar

Penulis melakukan wawancara dengan pengunjung bernama Muhar Juan dari Siak pada tanggal 09 Desember 2018 jam 15.55-16.05 tentang pengunjung dari mana saja yang pernah ditemui, mengatakan:

“ Saya baru pertama kali kesini dan belum pernah melihat wisatawan asing tetapi tadi saya sempat berkenalan dengan pengunjung dari Dumai. Saya mengetahui ekowisata mangrove ini informasi dari saudara saya”

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Asriana dari Pekanbaru pada tanggal 09 Desember 2018 jam 15. 08-15.20, mengatakan:

“ Kami tidak pernah melihat wisatawan dari luar negeri, karna disini tidak ada buku pengunjung, kalau kami dari organisasi 1000 Guru yang anggotanya dari berbagai daerah, Kami disini melakukan Outbond untuk silaturahmi. Kami mendapat informasi dari teman satu organisasi (namanya annisa dari Sungai Kayu Ara) tentang ekowisata mangrove Sungai Rawa ini”

Dari hasil wawancara diatas maka dapat penulis sampaikan bahwa pengunjung yang saya temui baru pertama kali mengunjungi ekowisata mangrove Sungai Rawa, dan mereka tidak pernah melihat wisatawan asing dari luar negeri.

2. Tourist Attraction

Penulis melakukan wawancara dengan pengunjung bernama Muhar Juan dari Siak pada tanggal 09 Desember 2018 jam 15.55-16.05, tentang daya tarik ekowisata mangrove Sungai Rawa, sarana prasarana dan kebersihan, beliau mengatakan:

“Selain untuk hiburan disini saya mengajak anak saya untuk memperkenalkan tanaman baku yang ada disini agar mereka tau, jadi belajar sambil bermainlah istilahnya. Tempatnya bagus hanya saja harus diperlukan perawatan tempat seperti diminyak mungkin jembatannya karna kebanyakan bikin mangrove sana sini sudah sampai banyak pengunjung tetapi jadi sepi lagi karna tempat yang sudah rusak, yang harus ditambah adalah semacam hiburan, entah itu zapin, kompiang atau kegiatan untuk memancing pengunjung, kemudian pegangan dipinggir jembatannya juga kurang untuk keselamatan anak-anak”.

Kemudian penulis melakukan wawancara dengan Asriana dari Pekanbaru pada tanggal 09 Desember 2018 jam 15.08-15.20, mengatakan:

“Daya tarik lain disini adalah pantainya, sungai, dan hamparan hutan yang hijau jika dilihat dari menara pantainya. Sarana prasarana disini masih kurang seperti tempat sampah saya lihat tidak ada disini juga susah nyari makan kemudian, toiletnya ngak ada air. Untuk kebersihan mungkin karna tidak ada tempat sampah jadi masih ada sampah-sampah plastik yang berserakan”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa daya tarik lain yang disajikan oleh ekowisata mangrove Sungai Rawa adalah Laut, Sungai dan Hutan yang hijau dapat dilihat dari menara pantau. Sarana prasarana masih banyak yang harus dibangun seperti tong sampah agar kebersihan tetap terjaga dan harus adanya pantauan dari petugas kebersihan untuk membersihkan sampah atau kayu yang terbawa arus laut, kemudian perlu adanya pertunjukan pentas seni untuk menarik wisatawan.

3. Aksesabilitas

Penulis melakukan wawancara dengan pengunjung bernama Muhar Juan dari Siak pada tanggal 09 Desember 2018 jam 15.55-16.05 tentang infrastruktur atau akses menuju ekowisata mangrove Sungai Rawa seperti penunjuk arah, papan informasi dan kondisi jalan, mengatakan:

“Petunjuk arah di persimpangan sebelum masuk ke mangrove ada, papan informasi yang saya lihat hanya tentang nama mangrove dan flora fauna tetapi yang lain tidak ada. Kondisi jalannya ada yang rusak parah terutama di jalan Buton, tetapi kalau sudah masuk Sungai Rawa jalannya sudah bagus”.

Kemudian penulis melakukan wawancara dengan Asriana dari Pekanbaru pada tanggal 09 Desember 2018 jam 15.08-15.20, mengatakan:

“Petunjuk arah ada, kalau jalan ada satu tempat yang rusak parah kemudian jalan masuk ke mangrove nya masih ada yang belum disemen kemudian jalannya kecil jadi untuk Bus masuk itu agak susah”.

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa akses menuju ekowisata mangrove Kampung Sungai Rawa yang menjadi masalah adalah kondisi jalan di Buton yang rusak parah, kalau untuk petunjuk arah sudah ada tetapi untuk papan informasi masih kurang.

4. Fasilitas dan Pelayanan Wisatawan

Penulis melakukan wawancara dengan pengunjung bernama Muhar Juan dari Siak pada tanggal 09 Desember 2018 jam 15.55-16.05 tentang Kelengkapan dan pelayanan yang diberikan oleh masyarakat maupun pengelola ekowisata mangrove, mengatakan bahwa:

“Saya lihat ada *Speed Boat* dan Pompong ya, mungkin itu bisa dimanfaatkan untuk wahana bermain, katanya disini juga bisa memancing tetapi saya lihat tidak ada petugas yang berjaga jadi kita bingung kalau seandainya mau memancing tidak tau mau bertanya kepada siapa dan tidak ada informasi tentang itu. Kalau untuk masyarakat nya ramah-ramah”.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Asriana dari Pekanbaru pada tanggal 09 Desember 2018 jam 15. 08-15.20, mengatakan:

“Menurut saya wahana bermain itu penting untuk menambah daya tarik ekowisata mangrove ini begitupun dengan tempat pemancingan. Kalau untuk pelayanan dari masyarakatnya baik orang disini ramah-ramah dan bersedia memberikan informasi jika kita membutuhkan”.

Dari wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa wahana bermain juga perlu dibangun untuk daya tarik dengan memanfaatkan Pompong milik warga untuk berkeliling hutan mangrove dan tempat pemancingan yang memadai lengkap dengan peralatannya. Sedangkan untuk pelayanan dari pihak pengelola kurang karena tidak ada satupun petugas yang berjaga, masyarakat Kampung nya ramah-ramah dan bersedia memberikan informasi.

Dari hasil observasi serta wawancara yang telah penulis lakukan, maka penulis menarik kesimpulan berdasarkan masing-masing indikator penelitian yang penulis gunakan, yakni Upaya Pemerintah Kampung Dalam Pengembangan Ekowisata Mangrove adalah sebagai berikut:

Tabel V.5 Upaya Pemerintah Kampung Dalam Pengembangan Ekowisata Mangrove Di Kampung Sungai Rawa Kabupaten Siak

No	Indikator	Upaya Pengembangan
1.	Pangsa Pasar	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan promosi melalui media sosial diantaranya dengan membuat web https://wisatamangrovesungairawa.wordpress.com, akun facebook dengan alamat Ekowisata Mangrove Sungai Rawa, serta Instagram dengan nama ekowisatamangrovesr yang didalamnya terdapat profil, foto dan video. Setiap ada tamu dari luar pemerintah kampung menjadikan gazebo di kawasan ekowisata mangrove menjadi balai pertemuan dan tempat rapat sebagai ajang promosi.
2.	Tourist Attraction	<ol style="list-style-type: none"> Melarang bagi siapa saja untuk tidak menebang atau merusak hutan bakau. Melakukan penanaman bibit bakau dan perawatan kawasan ekowisata mangrove.
3.	Aksesibilitas	<ol style="list-style-type: none"> Membuat petunjuk arah menuju ekowisata mangrove di setiap persimpangan jalan. Membuat peta lokasi di internet/media sosial. Selain memberikan kemudahan dalam akses menuju ekowisata mangrove, pemerintah kampung dan pihak pengelola juga memberikan kemudahan bagi para pengunjung sesuai kepentingan. Bagi yang ingin belajar pihak pengelola siap untuk memberikan materi dan bimbingan mengenai flora dan fauna yang ada di kawasan ekowisata mangrove.
4.	Kualitas dan pelayanan wisatawan	<ol style="list-style-type: none"> Memberikan pelatihan bagi kelompok pemerhati mangrove tentang pengetahuan seputar mangrove dan kawasan pesisir, bagaimana memberikan pelayanan bagi para wisatawan serta pelatihan menjadi seorang tour guide.

5.	Elemen Institusi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengait investor-investor dari pusat maupun dari yayasan untuk pengembangan ekowisata. 2. Ikut bergabung kedalam organisasi-organisi salah satunya organisasi ICCTF untuk mendapatkan bantuan dan mencari link untuk pengembangan ekowisata mangrove. 3. Membuat proposal permohonan kepada yayasan dan pemerintah daerah.
----	------------------	---

C. Hambatan-hambatan Dalam Upaya Pemerintahan Desa Dalam Pengembangan Ekowisata Mangrove Kampung Sungai Rawa Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak

Adapun Hambatan-hambatan Dalam Upaya Pemerintahan Desa Dalam Pengembangan Ekowisata Mangrove Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak adalah sebagai berikut:

1. Keterbatasan biaya atau dana untuk pengembangan ekowisata mangrove Kampung Sungai Rawa .
2. Kondisi jalan yang ada di kawasan industri Buton yang rusak parah, jika hujan jalan tersebut akan banjir dan jika cuaca panas akan berdebu. Hal ini yang menjadikan Pemerintahan Desa Kampung Sungai Rawa kurang bersemangat dalam melakukan pengembangan ekowisata mangrove tersebut.
3. Limbah dari industri yang mengakibatkan pencemaran lingkungan yang berakibat kepada rusaknya tanaman-tanaman mangrove.

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah di uraikan pada bab sebelumnya, maka upaya pemerintahan desa dalam pengembangan ekowisata mangrove kampung sungai rawa kecamatan sungai apit kabupaten siak adalah sebagai berikut:

1. Sarana/Prasarana penunjang di ekowisata mangrove Kampung Sungai Rawa belum sepenuhnya memadai seperti tidak adanya rumah singgah, dan kurangnya papan larangan dan slogan-slogan sebagai pemanis. kelengkapan yang ada di ekowisata mangrove Sungai Rawa masih minim dan masih banyak yang harus dibangun terutama yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Selama ini Kampung belum melakukan kerjasama dengan desa lain, Pemerintah Daerah maupun dari pihak ketiga. Tetapi kampung mendapatkan bantuan dari Yayasan Mitra Insani (YMI), Bapenas dan Badan Lingkungan Hidup (BLH). Penerimaan dari masyarakat pun sangat positif hanya saja swadaya dari masyarakat nya masih kurang. Adapun sarana pelengkap yang perlu dibangun pada ekowista mangrove Kampung Sungai Rawa adalah sebagai berikut:

1. Musholla
2. Tempat Sampah
3. Papan Informasi/Slogan
4. Pertunjukan Seni
5. Wahana Bermain

6. Tempat Parkir yang memadai

Pemerintahan Kampung belum menjadikan pengembangan ekowisata mangrove sebagai program dalam Peraturan Desa dan belum dimuat ke dalam APBDes dikarenakan Pemerintahan Kampung masih bingung dan takut terjadinya kesalahan dalam pengguna anggaran, karena tidak adanya petunjuk dalam penghitungan Rencana Anggaran Biaya (RAB).

2. Adapun upaya pemerintahan desa dalam pengembangan ekowisata mangrove adalah sebagai berikut:
 - 1) Melakukan program penanaman bibit bakau.
 - 2) Membentuk kelompok pemerhati hutan mangrove sebagai unsur yang ditunjuk untuk pengelola dilapangan.
 - 3) Memberikan pelatihan kepada pihak pengelola tentang bagaimana caranya memberikan pelayanan kepada wisatawan.
 - 4) Mempromosikan ekowisata mangrove melalui media sosial seperti instagram, facebook, dan membuat vidio dokumentasi serta dari mulut ke mulut.
3. Faktor penghambat utama dalam pengembangan ekowisata mangrove adalah keterbatasan biaya/dana, Jalan menuju ekowisata Mangrove belum sepenuhnya baik, hal ini dapat terlihat dari jalan industri Buton yang menjadi jalan utama menuju ekowisata mangrove Sungai Rawa rusak parah.

B. Saran

Adapun saran penulis dalam Upaya Pemerintahan Desa Dalam Pengembangan Ekowisata Mangrove Kampung Sungai Rawa Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak adalah:

1. Pemerintahan Desa atau pihak pengelola harus pro aktif dan berkomunikasi dengan Pemerintah Daerah untuk menjalin kerjasama, agar mendapatkan dana untuk pengembangan ekowisata.
2. Tempat wisata yang bagus harus juga di dukung oleh infrastruktur yang baik dan pembiayaan yang cukup, untuk itu Pemerintah Daerah yang ingin membangun tempat wisata guna mensejahterakan rakyat.
3. Untuk masyarakat kampung Sungai Rawa harus lebih berpartisipasi dan memberikan sumbansi baik berupa ide maupun kritikan yang membangun agar ekowisata mangrove tersebut lebih baik.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

BUKU

- Adisamita, Raharjo. 2006. *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Anom surya Putra.2015.*Buku 7 Badan Usaha Milikdesa: Spirit Kolektif desa, Kementeriandes, Pembangunan Daerah Tertinggal, DanTransmigrasi Republik Indonesia.*
- Andi. *Perencanaan Strategis Untuk Menghadapi Abad 21*. Jakarta: Raja Gravindo Persada
- Andre Payne, 1997, *Strategi pembangunan*,PT Rineka Cipta, Jakarta
- Awang, Azam dan Mendra Wijaya, 2012, *Ekologi Pemerintahan*,Pekanbaru: Alaf Riau
- Damanik, Janiantondan Helmut F. Weber. 2006. *Perencanaan Ekowisata: dari Teorike Aplikasi*. Yogyakarta: Andi.
- Inskeep, Edward. 1991. *Komponen Perencanaan/Pengembangan Pariwisata*.
- George R.Terry, 2014. *Prinsip-prinsip Manajemen*, PT. Bumi Aksara. Jakarta
- Hakim, Luchman. 2004. *Dasar-Dasar Ekowisata*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Hanif Nurcholis.2012.*Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*.Jakarta:Erlangga.
- Hunger, J. David dan Thomas L. Wheelen. 2003. *Manajemen Strategis*. Yogyakarta
- Mardalis, 2010. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Bumi Aksara: Jakarta
- Moch, Solekhan, 2014. *Penyelenggaraan Pemerintah Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*, Setara Press: Jakarta
- Ndraha Talidzu, 1997, *Metodologi Ilmu Pemerintahan*, Rineka Cipta: Jakarta
- Ndraha Talidzu. 2005. *Kybernologi Sebuah Rekontruksi Ilmu Pemerintahan*, Jakarta: Rineka Cipta

- Nugroho Riant dan R. Wihantoro Randy, 2006, *Manajemen Perencanaan Pembangunan*, PT. Alex Media Komputindo. Jakarta
- Rangkuti, Fredy. 2006. *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis Berorientasi Konsep*
- Rosidin Darma, 2010, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*, CV Andi offset, Yogyakarta
- Sumihardjo, Tumar. 2008. *Daya Saing Berbasis Potensi Daerah*. Bandung: Fokusmedia
- Suryadi, 1995, *Pembangunan sebagai usaha kebutuhan dasar rakyat*, PT Jayanusa Jakarta
- Surya Ningrat Bayu. 1992. *Mengenal Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Rineka Cipta
- Soemarwoto, 1993, *Ekonomi Pembangunan*, PT Rineka: Jakarta
- Tripomo, Tedjo dan Udan. 2005. *Manajemen Strategi*. Bandung: Rekayasa Sains
- Trisnawati, Sule Erni dan Sefullah, Kurniawan. 2005. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Kencana
- Widjaja, HAW, 2010, *Otonomi Desa*. PT. Rajagrafindo Persada: Jakarta
- Wasistiono, Sadu dan Tahir, Irwan. 2006. *Prospek Pengembangan Desa*. Bandung: Fokusmedia
- Yoeti, O. A. 2000. *Ekowisata Pariwisata Berwawasan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Pertja.

DOKUMEN

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Siak. 2016. *Statistik Daerah Kecamatan Sungai Apit 2016. Siak*.
- Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Siak, 2012-2016 *Rencana Strategis (RENSTRA)*
- Peraturan Desa Kampung Sungai Rawa Tahun 2017/2018
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No 4 Tahun 2007 Tentang *pedoman pengelolaan Kekayaan Desa*.

Peraturan Desa Kampung Lalang Tahun 2011-2015

Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 7 Tahun 2007 *Tentang Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga*

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Dasar 1945

JURNAL

Putri Pauziah, 2017, *Strategi Pengembangan Ekowisata Mangrove*, Di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak

Marceilla Hidayat, 2011, *Strategi Perencanaan Dan Pengembangan Objek Wisata* (Studi Kasus Pantai Pangandaran Kabupaten Ciamis Jawa Barat)

